

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DAN KONEKSI POLITIK  
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Penyusun Tesis S-2 Program Studi Magister Akuntansi Fakultas  
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia



**Disusun oleh:**

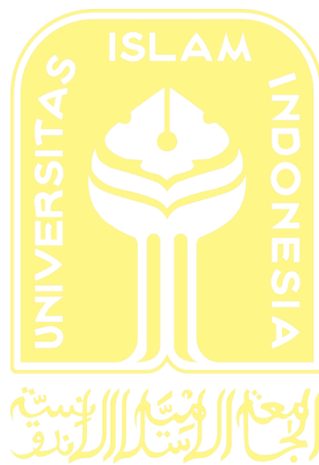
Monica Kristi Ramadani

Nomor Induk Mahasiswa 24919019

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 28 Mei 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## **BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Program Studi Akuntansi Program Magister,  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan  
ujian tesis yang disusun oleh :

**MONICA KRISTI RAMADANI**

No. Mhs. : 24919019

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DAN KONEKSI POLITIK  
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

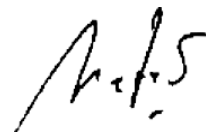
Berdasarkan penilaian yang diberikan  
oleh Tim Penguji, maka tesis tersebut  
dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Monica Kristi Ramadani  
Nomor Induk Mahasiswa : 24919019  
Program Studi : Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia  
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Karakteristik dan Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya asli yang disusun berdasarkan hasil penelitian serta analisis penulis sendiri. Seluruh gagasan, teori, data, kutipan, dan pendapat yang bersumber dari pihak lain telah di cantumkan dan disitasi secara tepat sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku.
2. Artikel ilmiah ini belum pernah diajukan, dipublikasi, ataupun digunakan sebelumnya dalam jurnal, seminar, maupun kepentingan akademik lainnya.
3. Dengan demikian penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keaslian serta kebenaran isi dari artikel ilmiah ini.

Yogyakarta, 28 Mei 2026



Monica Kristi Ramadani

Nomor Induk Mahasiswa 24919019

## MOTTO

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.”*

(QS. Al-Isra : 7)

*“Hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi setiap proses akan membawamu menjadi pribadi yang lebih kuat.”*

-Twenty Five Twenty One-

*“I think the process of chasing something is already meaningful. Even if it feels difficult and exhausting, every step you take will eventually become something valuable for yourself.”*

-Mark Lee-

*“It’s not always easy, but that’s life. Be strong, because there are better days ahead”*

-Mark Lee-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya, sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dengan judul “**Analisis Pengaruh Karakteristik dan Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia**”.

Dalam menyusun tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatannya dan untuk menyelesaikan tesis ini membutuhkan bantuan dari beberapa pihak. Tanpa bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang terkait sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ependi dan Hariani, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, ketulusan, doa, serta kasih sayang yang telah diberikan tanpa henti. Meskipun mama dan bapak tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, mama dan bapak selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis, baik melalui dukungan moral maupun finansial, serta senantiasa memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup yang telah dilalui bersama sebagai sebuah keluarga mungkin tidak selalu mudah, namun dari setiap proses tersebut penulis belajar banyak tentang arti kekuatan, tanggung jawab, perjuangan, dan kemandirian. Meski keluarga ini tidak terbiasa mengungkapkan perasaan secara langsung, penulis memahami bahwa di balik setiap diam terdapat doa dan harapan yang tidak pernah putus. Cinta dan dukungan yang diberikan mungkin hadir dalam bentuk sederhana, tetapi selalu terasa begitu besar dan berarti.

Selesainya tesis ini menjadi salah satu bentuk terwujudnya doa serta harapan mama dan bapak, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyandang gelar magister seperti yang diharapkan. Penulis berharap mama dan bapak senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta dapat menyaksikan berbagai pencapaian dan keberhasilan penulis di masa yang akan datang.

2. Kepada kedua adik laki-laki penulis, Andhika Dwi Saputra dan Raymond Albert, penulis mengucapkan terima kasih karena selalu menjadi salah satu alasan penulis untuk terus belajar dan berkembang menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang. Kehadiran, canda, dan semangat yang kalian berikan menjadi warna tersendiri dalam perjalanan penulis menyelesaikan tesis ini. Penulis berharap segala proses dan pencapaian yang diraih dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus mengejar impian, tumbuh menjadi pribadi yang baik, dan mencapai keberhasilan yang lebih besar di kemudian hari.
3. Kepada Armaniah almarhumah nenek tercinta, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, serta kenangan indah yang semasa hidup selalu diberikan kepada penulis. Meskipun kini nenek tidak lagi hadir untuk menyaksikan secara langsung perjalanan dan pencapaian ini, segala nasihat, perhatian, dan cinta yang pernah diberikan akan selalu hidup di dalam hati penulis. Tesis ini penulis persembahkan sebagai salah satu bentuk rasa sayang dan terima kasih, dengan harapan semoga nenek mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan senantiasa dikenang dalam setiap langkah kehidupan penulis.
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Arief Rahman S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Kepada Bapak Arief Rahman S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, ilmu, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Setiap saran dan masukan yang diberikan menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dan menjadi manfaat bagi banyak orang.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada 21312189/24919022, penulis menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan tesis ini, bukan hanya sebagai penyemangat tetapi juga sebagai alasan mengapa setiap lelah terasa lebih ringan dan setiap halaman dapat diselesaikan dengan lebih tenang.
9. Kepada Wella Eventsiy, penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih karena selalu menjadi teman yang mampu menghadirkan semangat, tawa, dan cerita di tengah lelahnya perjalanan akademik. Segala bantuan, perhatian, dan momen yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga yang tidak akan penulis lupakan. Semoga pertemanan ini selalu terjaga dan setiap langkah yang dijalani ke depannya dipenuhi kebahagiaan serta keberhasilan.
10. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam upaya penyelesaian tesis ini.
11. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun perjalanan hidup tidak selalu berjalan mudah, serta tetap memilih untuk bangkit di

tengah berbagai kekecewaan dan luka yang pernah dirasakan. Selesainya tesis ini menjadi bukti bahwa setiap proses, air mata, doa, dan perjuangan yang telah dilalui tidak pernah sia-sia. Pencapaian gelar S.Ak., M.Ak. bukan hanya sebuah keberhasilan akademik, tetapi juga simbol dari kekuatan, keteguhan, dan kerja keras yang selama ini diperjuangkan. Untuk langkah kehidupan berikutnya, semoga penulis selalu mampu menghargai diri sendiri, merayakan setiap pencapaian sekecil apa pun, dan terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bahagia, serta membanggakan. God, thank You for shaping me into an independent woman. There may be greater things ahead, but this journey will always be one of the achievements I cherish the most.

Dari penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran positif diharapkan oleh penulis dalam mengembangkan tesis ini, sehingga dapat menjadi sebuah karya tulis yang sempurna dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain

Yogyakarta, 30 April 2026



Monica Kristi Ramadani

Nomor Induk Mahasiswa 24919019

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                             | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                                   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                                                  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                               | <b>1</b>    |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                                                                                                 | 1           |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                                                                                                                                | 6           |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....                                                                                                                               | 7           |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....                                                                                                                             | 7           |
| 1.4.1.    Manfaat Teoritis .....                                                                                                                            | 7           |
| 1.4.2.    Manfaat Praktis .....                                                                                                                             | 8           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                                                                                                                          | <b>9</b>    |
| 2.1    Teori Agensi .....                                                                                                                                   | 9           |
| 2.2    Teori Stakeholder .....                                                                                                                              | 10          |
| 2.3    Teori Legitimasi .....                                                                                                                               | 12          |
| 2.4    Koneksi Politik.....                                                                                                                                 | 13          |
| 2.5    Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....                                                                                                            | 15          |
| 2.6    Penelitian Terdahulu.....                                                                                                                            | 16          |
| 2.7    Hubungan Koneksi Politik Kepala daerah dengan Pengungkapan<br>Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah .....                       | 22          |
| 2.8    Hubungan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah dengan Pengungkapan<br>Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah .....                    | 24          |
| 2.9    Hubungan Masa Jabatan Kepala Daerah dengan Pengungkapan Informasi<br>TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah.....                           | 26          |
| 2.10    Hubungan Afiliasi Politik Dengan Kepala Daerah Sebelumnya Terhadap<br>Pengungkapan Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah ..... | 28          |

|                                        |                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.11                                   | Hubungan Koalisi Partai Politik di DPRD terhadap Pengungkapan Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah ..... | 30        |
| 2.12                                   | Kerangka Penelitian .....                                                                                                      | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> |                                                                                                                                | <b>32</b> |
| 3.1                                    | Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                        | 32        |
| 3.1.1.                                 | Jenis Penelitian.....                                                                                                          | 32        |
| 3.1.2.                                 | Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                  | 32        |
| 3.2                                    | Populasi dan Sampel .....                                                                                                      | 33        |
| 3.2.1.                                 | Populasi.....                                                                                                                  | 33        |
| 3.2.2.                                 | Sampel.....                                                                                                                    | 34        |
| 3.3.                                   | Metode Analisis Data .....                                                                                                     | 35        |
| 3.3.1.                                 | Analisis Statistik Deskriptif .....                                                                                            | 35        |
| 3.3.2.                                 | Analisis Regresi Linear Berganda.....                                                                                          | 36        |
| 3.3.3.                                 | Uji Korelasi dan Multikolinieritas .....                                                                                       | 36        |
| 3.3.4.                                 | Uji Hipotesis .....                                                                                                            | 37        |
| 3.4.                                   | Definisi Operasional Variabel Penelitian .....                                                                                 | 40        |
| 3.4.1.                                 | Koneksi politik.....                                                                                                           | 40        |
| 3.4.2.                                 | Tingkat Pendidikan .....                                                                                                       | 41        |
| 3.4.3.                                 | Masa Jabatan .....                                                                                                             | 42        |
| 3.4.4.                                 | Hubungan Dengan Kepala Daerah Sebelumnya .....                                                                                 | 42        |
| 3.4.5.                                 | Koalisi DPRD .....                                                                                                             | 43        |
| 3.4.6.                                 | Pengungkapan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) .....                                                                 | 44        |
| 3.5.                                   | Skala Pengukuran.....                                                                                                          | 44        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>          |                                                                                                                                | <b>47</b> |
| 4.1                                    | Hasil Penelitian .....                                                                                                         | 47        |
| 4.1.1.                                 | Analisis Deskriptif .....                                                                                                      | 47        |
| 4.1.2.                                 | Uji Korelasi dan Multikolinearitas.....                                                                                        | 49        |
| 4.1.3.                                 | Uji Regresi Linear Berganda.....                                                                                               | 50        |
| 4.1.4.                                 | Uji Hipotesis .....                                                                                                            | 52        |
| 4.2                                    | Pembahasan.....                                                                                                                | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>              |                                                                                                                                | <b>32</b> |

|                       |                              |           |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| 5.1.                  | Kesimpulan .....             | 32        |
| 5.2.                  | Implikasi.....               | 34        |
| 5.2.1.                | Implikasi Teoritis.....      | 34        |
| 5.2.2.                | Implikasi Praktis .....      | 35        |
| 5.3.                  | Keterbatasan dan Saran ..... | 36        |
| <b>REFERENSI.....</b> |                              | <b>32</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  |                              | <b>40</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu.....                   | 15 |
| <b>Tabel 2.</b> Skala Pengukuran Setiap Variabel.....       | 44 |
| <b>Tabel 3.</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif.....         | 47 |
| <b>Tabel 4.</b> Matriks Korelasi.....                       | 49 |
| <b>Tabel 5.</b> Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... | 50 |
| <b>Tabel 6.</b> Hasil Uji Hipotesis.....                    | 52 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.</b> Kerangka Penelitian..... | 32 |
|-------------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <b>Lampiran 1.</b> Indeks Pengukuran TJSL.....      | 54 |
| <b>Lampiran 2.</b> Kabupaten/Kota di Indonesia..... | 57 |

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik kepala daerah dan koneksi politik terhadap pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pada situs web resmi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menerapkan teori agensi, teori pemangku kepentingan, dan teori legitimasi untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik politik dan praktik pengungkapan TJSL. Pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional digunakan dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari situs web resmi pemerintah, hasil pemilihan, profil kepala daerah, dan publikasi politik. Variabel independen terdiri dari koneksi politik, tingkat pendidikan, masa jabatan, afiliasi politik dengan kepala daerah sebelumnya, dan kekuatan koalisi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sedangkan variabel dependen adalah pengungkapan TJSL. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Temuan diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran karakteristik politik dan kepemimpinan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan TJSL berbasis digital.

**Kata Kunci :** Koneksi politik, pengungkapan TJSL, pemerintah daerah, transparansi, akuntabilitas

## ABSTRAK

*This study analyzes the influence of regional head characteristics and political connections on the disclosure of social and environmental responsibility (TJSL) information on the official websites of district and municipal governments in Indonesia. The study is motivated by the increasing demand for transparency and accountability in local government governance, particularly in supporting Sustainable Development Goals (SDGs). This research applies agency theory, stakeholder theory, and legitimacy theory to explain the relationship between political characteristics and TJSL disclosure practices. A quantitative approach with cross-sectional design is employed using secondary data collected from official government websites, election results, regional head profiles, and political publications. The independent variables consist of political connections, education level, tenure, political affiliation with previous regional heads, and coalition strength in the Regional House of Representatives (DPRD), while the dependent variable is TJSL disclosure. Multiple linear regression analysis is used to examine the hypotheses. The findings are expected to provide empirical evidence regarding the role of political and leadership characteristics in encouraging transparency and accountability through digital-based TJSL disclosure.*

**Keywords :** Political connection, TJSL disclosure, local government, transparency, accountability

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada awalnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipahami sebagai kegiatan sosial atau bantuan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu masyarakat (Surono & Mayangsari, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak lagi terbatas pada sektor swasta, tetapi juga semakin relevan dalam konteks sektor publik, khususnya pemerintahan daerah (Mwandu, 2023). Di sektor publik, TJSL tercermin dalam berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan, seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, perlindungan kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap ekonomi lokal (Hawrysz & Foltys, 2015; Munawaroh, 2025). Program-program tersebut dapat dipandang sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, pengungkapan informasi mengenai aktivitas TJSL menjadi penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik (Nugraheni et al., 2025).

Hingga saat ini, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) oleh pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya regulasi yang secara khusus dan mengikat yang mengatur kewajiban pengungkapan TJSL oleh pemerintah (Firmansyah, 2025). Berbeda dengan sektor korporasi di Indonesia yang telah diatur untuk mengungkapkan informasi CSR melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas mengenai jenis informasi TJSL yang perlu diungkapkan, tingkat kedalaman informasi, maupun media yang digunakan untuk menyampaikannya kepada publik sehingga kondisi ini menyebabkan praktik pengungkapan TJSL antar daerah menjadi sangat beragam (Georgieva, 2025).

Seiring dengan komitmen Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengungkapan TJSL pemerintah daerah menjadi semakin penting. Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan tujuan SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, serta perlindungan lingkungan hidup (Putra et al., 2024). Akan tetapi, tanpa pengungkapan informasi TJSL yang memadai, terbuka, dan mudah diakses oleh publik, masyarakat dan pemangku kepentingan akan kesulitan untuk menilai sejauh mana

kontribusi pemerintah daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut (Alsayegh et al., 2023).

Di era digitalisasi, pemanfaatan media digital menjadi peran penting dalam mewujudkan transparansi informasi dan pelayanan publik. Melalui keterbukaan ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menyampaikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara jelas, terbuka dan mudah diakses (Ernungtyas & Boer, 2023). *Website* (situs internet) resmi pemerintah merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi (Debby et al., 2024). Dengan tingginya penggunaan internet di masyarakat, pemanfaatan situs internet sebagai sarana komunikasi TJSL menjadi semakin relevan (Harmoni, 2010). Karena melalui media ini masyarakat dapat memperoleh akses langsung untuk mengevaluasi kinerja serta keputusan pemerintah (Irawati et al., 2024).

Perbedaan dalam cara mengungkapkan informasi TJSL dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik lokal. Salah satu faktor tersebut adalah koneksi politik yang dimiliki oleh kepala daerah, yang dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurut Mardiana et al (2024), koneksi politik dapat mempengaruhi pengungkapan TJSL terutama di negara berkembang karena adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan kekuasaan politik. Koneksi semacam ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi sosial dan lingkungan. Jika kepala daerah

memiliki hubungan dekat dengan pelaku usaha, hal tersebut dapat memunculkan persepsi tertentu di masyarakat terkait objektivitas informasi yang disampaikan melalui situs internet pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Selain itu, dinamika politik lokal juga sangat dipengaruhi oleh komposisi dan kekuatan koalisi partai-partai di DPRD. Secara normatif DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sejajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam implementasinya hubungan ini kerap tidak seimbang. Prayudi (2019) menyatakan bahwa lemahnya mekanisme konsultasi politik di tingkat daerah menyebabkan DPRD cenderung berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik termasuk keterbukaan informasi tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Hakim (2019) yang menunjukkan bahwa hubungan kepala daerah dan DPRD seringkali dipengaruhi oleh kedekatan pribadi dan kepentingan politik jangka pendek. Jika kepala daerah berasal dari partai yang sama dengan mayoritas anggota DPRD, pengawasan cenderung melemah. Sebaliknya, ketika terjadi perbedaan kepentingan politik, konflik antara eksekutif dan legislatif dapat menghambat kinerja pemerintahan (Suri, 2025).

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan masih berfokus pada sektor swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kajian yang menelaah praktik

pengungkapan TJSL di sektor publik, khususnya pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian Surono & Mayangsari (2022), menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan *go public* dan perusahaan BUMN di Indonesia periode 2015-2019. Selanjutnya, Al-akayleh & Aviation, (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan *foreign ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan visibilitas perusahaan berpengaruh negatif dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange periode 2014–2018. Sejalan dengan temuan tersebut, Thu et al., (2025) juga menemukan bahwa independensi dewan, penghargaan CSR, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan CSR, meskipun *industry sensitivity* berpengaruh negatif dan *financial leverage* menunjukkan efek campuran pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam periode 2017–2022. Walaupun ketiga penelitian telah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, kajiannya masih berfokus pada sektor korporasi. Sehingga menyisakan kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan TJSL di sektor publik, khususnya pemerintah daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap karakteristik kepala daerah dan koneksi politik sebagai faktor yang berpotensi mendorong atau menghambat pengungkapan informasi TJSL

pada situs internet resmi pemerintah daerah. Seiring meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur dengan menelaah bagaimana dorongan masyarakat, kepemimpinan kepala daerah, keterkaitan politik, serta pengawas politik internal pemerintah daerah dapat mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dan lingkungan secara digital oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepala daerah yang berasal dari partai politik pemenang pemilu berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
2. Apakah tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
3. Apakah masa jabatan kepala daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
4. Apakah hubungan politik dengan kepala daerah sebelumnya berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
5. Apakah kekuatan koalisi partai politik di DPRD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh kepala daerah yang berasal dari partai politik pemenang pemilu terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh masa jabatan kepala daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh hubungan politik dengan kepala daerah sebelumnya terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh koalisi partai politik di DPRD terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pemerintah kabupaten/kota di Indonesia

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan literatur di bidang sektor publik, khususnya akuntansi

pemerintahan. Selama ini, kajian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) lebih banyak difokuskan pada sektor swasta atau perusahaan, sementara peran faktor politik lokal seperti koneksi politik kepala daerah dan kekuatan koalisi partai di DPRD dalam mempengaruhi transparansi informasi pemerintah masih relatif jarang dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang menawarkan sudut pandang baru dalam menjelaskan bagaimana dinamika politik daerah berpengaruh terhadap keterbukaan informasi sosial dan lingkungan yang disampaikan melalui situs internet resmi milik pemerintah.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola komunikasi publik melalui situs internet resmi. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor politik dapat mempengaruhi tingkat keterbukaan informasi TJSL, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam menyampaikan informasi sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Temuan ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan internal terkait sistem pelaporan TJSL yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Agensi**

Konsep yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan berkembang dari pemahaman mengenai hubungan antara *prinsipal* dan *agent*, yaitu suatu pihak tertentu (*principal*) memberikan tugas atau wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pihak (*agent*) melalui suatu perjanjian atau kontrak kerjasama (Wardah & Nugrahaningsih, 2020). Moe (1984) menjelaskan bahwa teori keagenan dapat digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara rakyat sebagai pemberi mandat (*principal*) dan pemerintah sebagai pelaksana mandat (*agent*).

Dalam hubungan tersebut, sering muncul ketidakseimbangan informasi, terutama antara masyarakat dan pemerintah daerah karena keduanya memiliki tujuan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mahdiana & Amin (2020) yaitu teori keagenan beranggapan bahwa setiap pihak dalam hubungan keagenan didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing, sehingga berpotensi menimbulkan konflik keagenan (Prayuda & Arifin, 2024). Perbedaan kepentingan *principal* dan *agent* tentunya menimbulkan peluang terjadinya kecurangan (Endiana & Suryandari, 2017). Teori keagenan juga

mengasumsikan bahwa salah satu sifat manusia adalah mementingkan kepentingan diri sendiri (Lesmono & Siregar, 2021).

Dalam konteks pemerintahan daerah, *principal* dapat dipandang sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait kinerja dan tanggung jawab pemerintah, sementara *agent* diwakili oleh kepala daerah sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik dan menyampaikan informasi secara transparan. Perbedaan kepentingan antara keduanya berpotensi menimbulkan asimetri informasi, kepala daerah mungkin tidak sepenuhnya mengungkapkan informasi TJSL jika hal tersebut tidak sejalan dengan kepentingan politik atau citra mereka. Karakteristik kepala daerah, seperti masa jabatan atau latar belakang politik, serta koneksi politik dengan pihak tertentu, dapat mempengaruhi sejauh mana kewajiban pengungkapan ini dijalankan secara optimal. Dengan demikian, teori agensi membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor personal dan relasional kepala daerah dapat mempengaruhi kualitas dan konsistensi pengungkapan TJSL, sekaligus merefleksikan upaya untuk mengurangi konflik kepentingan melalui transparansi informasi.

## **2.2 Teori Stakeholder**

Dalam konteks pemerintahan, *stakeholder theory* menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menjalankan aktivitasnya hanya berdasarkan kepentingan internal birokrasi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan dari seluruh pihak yang

terdampak oleh kebijakan publik. Freeman (1984) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai aktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Dalam lingkungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan meliputi aparatur pemerintah daerah sebagai pihak internal, serta pihak eksternal seperti masyarakat, lembaga legislatif, LSM, media, dan pelaku usaha lokal yang berkepentingan terhadap transparansi, kualitas layanan publik dan tata kelola pembangunan daerah (Tampubolon, 2019). Mahajan et al., (2023) menegaskan bahwa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan tersebut berpengaruh langsung pada kinerja, keberlanjutan, serta efektivitas strategi pengelolaan organisasi. Teori ini menjadi dasar yang menjelaskan mengapa pemerintah daerah terdorong untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan sebagai bentuk respons terhadap tekanan atau ekspektasi pemangku kepentingan.

Dari perspektif teori *stakeholder*, transparansi dan pengungkapan informasi merupakan kewajiban moral sekaligus strategis bagi pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Pemerintah perlu menyediakan informasi mengenai berbagai aktivitas sosial dan lingkungan agar pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang jelas tentang komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan prinsip tata kelola yang baik. Pengungkapan informasi yang dilakukan secara transparan terbukti meningkatkan kepercayaan serta hubungan timbal balik antara organisasi dan para pemangku kepentingannya (Kumar, 2023). Maulana et al., (2023) menjelaskan bahwa organisasi baik publik maupun privat,

cenderung melakukan pengungkapan secara sukarela untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terkait aspek sosial, lingkungan, dan intelektual, di luar kewajiban formal yang diatur oleh regulasi.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada situs internet resmi pemerintah daerah menjadi manifestasi nyata dari upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan pemangku kepentingan atas transparansi. Informasi yang disajikan tidak hanya menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap isu sosial dan lingkungan, tetapi juga berfungsi membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi, serta mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga teori *stakeholder* memberikan landasan bahwa kualitas pengungkapan termasuk yang dipengaruhi oleh karakteristik dan koneksi politik kepala daerah pada akhirnya mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap seluruh pemangku kepentingan.

## 2.3 Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) menjelaskan bahwa organisasi akan berusaha menjalankan kegiatannya sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat agar dapat diterima. Legitimasi sendiri berarti bagaimana masyarakat menilai apakah tindakan suatu organisasi sudah pantas dan sesuai dengan aturan sosial yang berlaku (Suchman, 1995). Deegan (2002) menyatakan bahwa teori ini juga didasarkan pada konsep kontrak sosial, yaitu adanya hubungan tidak tertulis antara organisasi dan

masyarakat, bahwa organisasi diharapkan memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan nilai yang dianut masyarakat (Meutia et al., 2022). Oleh karena itu, organisasi biasanya melakukan berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan menyampaikan informasi secara terbuka, termasuk terkait kegiatan sosial dan lingkungan.

Dalam konteks pemerintahan, legitimasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program yang dijalankan serta menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik (Arif & Dutta, 2024). Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan tugasnya secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan harapan masyarakat. Dowling & Pfeffer, (1975) menyatakan jika terdapat perbedaan antara apa yang dilakukan organisasi dan apa yang diharapkan masyarakat (*legitimacy gap*), maka kepercayaan publik bisa menurun (Mayshelly, 2022). Oleh karena itu pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat, sehingga dapat menjaga kepercayaan dan penerimaan publik (Septiana & Aminah, 2025).

## **2.4 Koneksi Politik**

Purwoto (2011) mengatakan bahwa perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan

secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Rahman et al., 2025). Kepemilikan langsung oleh pemerintah dapat dilihat sebagai koneksi politik. Dengan demikian koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah (Soemaryono & Ismangil, 2023).

Menurut Faccio (2004), perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik apabila terdapat setidaknya satu pemegang saham utama atau pimpinan perusahaan, seperti CEO, presiden, wakil presiden, maupun sekretaris, yang memiliki keterkaitan dengan politik, baik sebagai anggota parlemen, menteri, maupun individu yang berafiliasi dengan politisi atau partai politik. Keberadaan koneksi politik tersebut berpotensi memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, antara lain kemudahan dalam memperoleh pembiayaan utang, beban pajak yang relatif lebih rendah, serta posisi daya saing yang lebih kuat di pasar. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memperoleh legitimasi dari hubungan politiknya, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial tidak selalu menjadi satu-satunya cara untuk membangun legitimasi (Sutawan & Sisdyani, 2022).

Dalam konteks pemerintahan, koneksi politik merujuk pada hubungan dekat antara pejabat dengan partai politik, legislatif, atau aktor politik lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Pejabat atau institusi pemerintah dengan koneksi politik yang kuat cenderung lebih mudah memperoleh dukungan untuk program kebijakan, akses terhadap pendanaan, serta legitimasi dalam

menjalankan tugasnya. Kedekatan ini juga dapat mempengaruhi cara pemerintah melaporkan kegiatan atau penggunaan anggaran, karena legitimasi politik bisa menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, tidak hanya kepatuhan formal terhadap regulasi.

## **2.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para pemangku kepentingan yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan (Kwalomine, 2018). CSR adalah program kepedulian perusahaan yang menyeimbangkan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat (Sudrajat et al., 2023). Perusahaan yang banyak mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* perusahaan memproyeksikan citra positif diri mereka kepada investor dan pemangku kepentingan. Tujuan pengungkapan CSR perusahaan adalah untuk memberikan informasi tentang implementasi dan kinerja CSR perusahaan dalam kaitannya dengan keberlanjutan, yang dianggap dapat menggambarkan prospek masa depan yang menjanjikan (Sudrajat et al., 2023).

Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan operasional dan mendukung pengembangan bisnis. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak

yang terlibat dalam aktivitas perusahaan (Cahyono et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dijalankan oleh pemerintah dan BUMN sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya fokus pada kepentingan internal atau birokrasi. Melalui TJSL, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik. Pemerintah yang aktif mengungkapkan program-program sosial dan lingkungan dapat meningkatkan citra positif di mata publik dan pemangku kepentingan. Pengungkapan TJSL juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana sumber daya publik digunakan untuk kepentingan sosial dan lingkungan.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Dengan merujuk pada kerangka konseptual yang disusun dari berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini dikembangkan dengan menunjukkan kesesuaian sekaligus perbedaan sebagai upaya memperluas dan memperdalam kajian yang telah ada. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan disajikan sebagai dasar pengembangan penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis                     | Objek                                                                                                                                                                                                       | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (Joseph, 2010)              | 145 situs internet pemerintah daerah (local authorities) di Malaysia, mencakup semua 14 yurisdiksi di Malaysia yang terdaftar pada portal “e-pbt”.                                                          | Tingkat pengungkapan masih rendah dengan rata-rata 106 kalimat per situs internet. Informasi ekonomi paling banyak diungkapkan, diikuti sosial dan lingkungan. Keterlibatan <i>stakeholder</i> dan transparansi keuangan sangat minim, dan situs internet belum dimanfaatkan optimal sebagai media partisipasi publik. |
| 2   | (Čiřmancová & Soviar, 2024) | 117 pemerintah lokal (kota dan desa) di tiga distrik di Slovakia (Prievidza, Žilina, Bytča). Penelitian menganalisis situs internet dan dokumen strategis (Program of Economic and Social Development/PESD) | Kota dan desa besar lebih banyak mengintegrasikan isu keberlanjutan dan memiliki dokumen yang lebih mutakhir. Namun, akses informasi masih terbatas, bahasa dokumen sulit dipahami warga, situs internet dan kanal digital sudah digunakan, tetapi                                                                     |

| No. | Penulis              | Objek                                                                                                                                                   | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                         | pemanfaatannya masih terbatas untuk menyampaikan tujuan, rencana, dan isu keberlanjutan secara terbuka.                                                                                                                                                                                                |
| 3   | (An et al., 2019)    | 8 universitas negeri di Hong Kong yang dianalisis melalui situs internet dan wawancara terkait pelaporan keberlanjutan daring.                          | Mayoritas universitas memiliki halaman khusus keberlanjutan dan melaporkan inisiatif secara cukup baik, terutama di aspek ekonomi, penelitian, dan layanan. Namun, pelaporan aspek sosial dan indikator kuantitatif masih rendah, serta dua universitas (Lingnan dan EDUHK) memiliki kinerja terendah. |
| 4   | (Nata & Aziza, 2025) | Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada pengungkapan tanggung jawab sosial melalui dokumen resmi pemerintah yang dianalisis menggunakan standar | Pengungkapan TJSL oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara optimal dan masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar antar daerah. Tingkat pengungkapan dipengaruhi oleh                                                                                                                           |

| No. | Penulis                 | Objek                                                                                                                                                 | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | Global Reporting Initiative (GRI), khususnya GRI 2 dan GRI 401–407                                                                                    | kapasitas institusional pemerintah, komitmen pimpinan daerah, serta tekanan eksternal seperti DPRD dan masyarakat. Situs internet resmi pemerintah daerah berperan penting sebagai media transparansi, namun pemanfaatannya belum merata.                                                          |
| 5   | (Matuszak et al., 2025) | Tiga perusahaan energi terbesar di Polandia (ENEA, PGE, ENERGA) dengan laporan keberlanjutan 2023 berbasis GRI yang dibandingkan dengan standar ESRS. | Tingkat adopsi GRI untuk topik lingkungan masih bervariasi (44–59%) dan relatif rendah dibandingkan persyaratan ESRS. PGE memiliki tingkat kesesuaian tertinggi (52%), sedangkan Energa terendah (25%). Perusahaan perlu memperbaiki sistem pengumpulan data dan memperluas cakupan pelaporan agar |

| No. | Penulis                   | Objek                                                                                                                                                                             | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                                                                                                                                                                                   | memenuhi standar ESRS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | (Tubay & Leon, 2020)      | 20 perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Filipina (Philippine Stock Exchange) per 31 Desember 2017.                                                                     | Tingkat pengungkapan keberlanjutan berbeda signifikan berdasarkan ukuran perusahaan (perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak). Tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan umur, profitabilitas, dan lokasi. Ketiga kategori pengungkapan (ekonomi, lingkungan, sosial) berkorelasi positif satu sama lain. |
| 7   | (Thimm & Rasmussen, 2021) | 154 perusahaan manufaktur di 13 negara Eropa (80 perusahaan besar, 74 UKM) yang dianalisis situs internet nya terkait pengungkapan manajemen lingkungan dan kepatuhan lingkungan. | Pengungkapan informasi manajemen lingkungan dan kepatuhan masih rendah. Perusahaan besar mengungkap lebih banyak daripada UKM, namun detail pengungkapan masih terbatas dan fitur komunikasi interaktif jarang digunakan.                                                                                      |

| No. | Penulis                   | Objek                                                                                                                                                         | Temuan                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | (León-silva et al., 2022) | 99 situs web pemerintah daerah pada tahun 2018 di negara-negara yang tergabung dalam Aliansi Pasifik (PA) di Amerika Latin                                    | Tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan oleh pemerintah daerah di negara-negara Pacific Alliance (Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru) masih tergolong rendah dan tidak merata, dengan rata-rata hanya mencapai 39,88%. |
| 9   | (Sayadi et al., 2025)     | Dampak berbagai jenis tekanan pemangku kepentingan terhadap pengungkapan lingkungan berbasis web (WED) di industri pertambangan Asia Tenggara.                | Hasil studi menunjukkan bahwa karyawan dan pesaing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap WED. Sementara itu, kreditor menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.                                               |
| 10  | (Ardi et al., 2021)       | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu, khususnya pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui situs internet resmi dan Media Center | Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui situs web Diskominfo Kota Bengkulu belum berjalan optimal. Meskipun struktur                                                 |

| No. | Penulis | Objek                                                                   | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | pemerintah kota sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. | organisasi dan dasar hukum sudah jelas, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, terutama dalam penyampaian data publik, kurangnya fasilitas teknis, serta belum maksimalnya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi kepada masyarakat juga masih terbatas, dan kebijakan “satu pintu informasi” justru membatasi akses media dan publik terhadap informasi pemerintah. |

## **2.7 Hubungan Koneksi Politik Kepala daerah dengan Pengungkapan Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan teori agensi, kepala daerah bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik.

Adanya perbedaan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas. Kepala daerah yang memiliki koneksi politik yang kuat, khususnya yang berasal dari partai politik pemenang, umumnya memiliki posisi politik yang lebih strategis dan menjadi lebih diperhatikan oleh publik. Kondisi ini mendorong kepala daerah untuk menunjukkan kinerja dan tanggung jawabnya melalui pengungkapan informasi, termasuk informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Selain itu, teori stakeholder menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, DPRD, partai politik, dan pemerintah pusat. Koneksi politik memperluas jaringan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga meningkatkan tuntutan agar pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan secara transparan. Pengungkapan informasi TJSL melalui situs internet resmi pemerintah daerah menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi di mata para pemangku kepentingan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliwati & Hariyati (2021) menemukan bahwa entitas yang memiliki koneksi politik cenderung mengungkapkan informasi CSR secara lebih luas dan berkualitas, karena hubungan politik menciptakan kebutuhan bagi organisasi untuk menjaga legitimasi, memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, serta

menunjukkan kepatuhan terhadap tuntutan publik. Sejalan dengan itu hasil penelitian lintas negara oleh Mardiana et al (2024) menunjukkan bahwa baik di negara (seperti Indonesia, Yordania, dan Bangladesh), negara ekonomi transformasi (seperti China), maupun di negara maju (seperti Portugal), koneksi politik memberikan dorongan signifikan bagi organisasi untuk meningkatkan pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan tersebut, koneksi politik kepala daerah diperkirakan mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi TJSL. Kepala daerah dengan koneksi politik yang lebih kuat diasumsikan memiliki dorongan yang lebih besar untuk menyampaikan informasi TJSL secara terbuka guna memenuhi tuntutan akuntabilitas dan ekspektasi para pemangku kepentingan.

*H1 : Kepala daerah yang berasal dari partai politik pemenang pemilu legislatif kabupaten/kota memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL pada situs internet resmi pemerintah daerah.*

## **2.8 Hubungan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah dengan Pengungkapan Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah**

Dalam teori agensi, kualitas agen menjadi faktor penting yang mempengaruhi bagaimana tugas dan tanggung jawab dijalankan. Tingkat pendidikan kepala daerah mencerminkan kapasitas pengetahuan, kemampuan analitis, dan pemahaman terhadap aturan serta mekanisme

pelaporan publik. Kepala daerah dengan latar pendidikan yang lebih tinggi cenderung mampu memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan dan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Kemampuan tersebut mendorong kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian Nararya et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan CEO berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan CSR. Mereka menegaskan bahwa pemimpin dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kapasitas kognitif dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu keberlanjutan, sehingga lebih mendorong keterbukaan informasi CSR kepada publik. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ma et al., 2019) menemukan bahwa tingkat pendidikan CEO berkorelasi positif dengan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan yang menunjukkan bahwa CEO dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memberikan informasi CSR yang lebih komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Para peneliti menjelaskan bahwa tingkat pendidikan meningkatkan kemampuan analitis, kesadaran etis, serta kecenderungan pemimpin untuk mengimplementasikan dan mengungkapkan praktik keberlanjutan secara lebih transparan.

Berdasarkan landasan teori agensi dan didukung oleh temuan penelitian terdahulu yang menemukan hubungan positif antara tingkat

pendidikan pimpinan dan tingkat pengungkapan informasi, dapat diasumsikan bahwa kepala daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung melakukan pengungkapan informasi TJSL secara lebih luas dan sistematis.

*H2 : Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi CSR pada situs internet resmi pemerintah daerah.*

## **2.9 Hubungan Masa Jabatan Kepala Daerah dengan Pengungkapan Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah**

Dalam teori agensi, masa jabatan kepala daerah mencerminkan tingkat pengalaman dan pemahaman agen dalam menjalankan mandat publik serta menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai prinsipal. Kepala daerah dengan masa jabatan yang lebih panjang cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme birokrasi, sistem pelaporan, dan tuntutan akuntabilitas publik, sehingga lebih mampu mengurangi asimetri informasi melalui pengungkapan TJSL yang terstruktur dan konsisten. Dari perspektif teori *stakeholder*, masa jabatan yang lebih lama juga memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mengenali dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, DPRD, dan institusi pengawas, sehingga pengungkapan TJSL menjadi sarana komunikasi dan legitimasi kebijakan publik.

Hasil penelitian Suminar & Purnama (2020), menunjukkan bahwa masa jabatan manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Mereka menemukan bahwa manajer atau direktur dengan masa jabatan lebih panjang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang organisasi, pengalaman yang lebih kuat, serta orientasi yang lebih besar terhadap penciptaan reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pemahaman serta pengalaman tersebut, mereka cenderung mengungkapkan informasi CSR secara lebih lengkap sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya menjaga citra institusi. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Septiany et al. (2025) yang menunjukkan bahwa CEO dengan masa jabatan lebih panjang memiliki kinerja keberlanjutan yang lebih baik dan lebih aktif dalam mengungkapkan informasi ESG/CSR. Menurut mereka, masa jabatan yang lebih lama memberikan stabilitas, legitimasi, dan ruang bagi pemimpin untuk membangun strategi keberlanjutan jangka panjang.

Berdasarkan keterkaitan antara teori agensi dan teori *stakeholder* dengan temuan penelitian terdahulu, masa jabatan kepala daerah dapat dipandang sebagai faktor yang memperkuat kemampuan dan insentif dalam menjalankan transparansi publik. Pengalaman dan stabilitas jabatan memungkinkan kepala daerah mengelola hubungan keagenan secara lebih efektif serta merespons tuntutan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kepala daerah dengan masa jabatan yang lebih panjang diasumsikan memiliki kecenderungan lebih besar untuk

mengungkapkan informasi TJSL secara lebih luas dan konsisten melalui situs internet resmi pemerintah daerah dibandingkan kepala daerah yang baru menjabat.

*H3 : Masa Jabatan periode kedua kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL*

#### **2.10 Hubungan Afiliasi Politik Dengan Kepala Daerah Sebelumnya Terhadap Pengungkapan Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah**

Dalam perspektif teori agensi, afiliasi politik dan hubungan kekerabatan kepala daerah dengan pendahulunya dapat mempengaruhi cara agen menjalankan mandat akuntabilitas publik. Kesamaan afiliasi politik maupun ikatan keluarga memungkinkan terjadinya kesinambungan kebijakan, pola pengelolaan pemerintahan, serta sistem pelaporan yang telah dibangun sebelumnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi yang biasanya muncul pada masa transisi kepemimpinan, karena kepala daerah baru memiliki pemahaman awal dan akses terhadap mekanisme pelaporan yang telah berjalan, termasuk dalam pengungkapan informasi TJSL.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhandika et al., (2024) menemukan bahwa afiliasi politik dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR karena kedekatan politik mendorong perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan, menjaga legitimasi, dan

memperkuat hubungan dengan pemerintah melalui pelaporan sosial yang lebih luas. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa afiliasi politik meningkatkan ekspektasi terhadap transparansi, sehingga organisasi terdorong untuk mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungannya secara lebih komprehensif. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Surono & Mayangsari, (2022) menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Aktor yang memiliki kedekatan dengan pejabat publik cenderung meningkatkan akuntabilitas sosial sebagai upaya menjaga dan mempertahankan hubungan politik tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan keluarga berperan dalam meningkatkan pengungkapan CSR, karena keberlanjutan reputasi keluarga menjadi faktor yang mendorong keterbukaan informasi sosial dan lingkungan.

Berdasarkan teori yang digunakan dan temuan penelitian terdahulu, kepala daerah yang memiliki afiliasi politik atau hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya cenderung memiliki insentif untuk menjaga keberlanjutan kebijakan dan reputasi pemerintahan. Kesenambungan kebijakan dan stabilitas hubungan politik atau keluarga mendorong kepala daerah untuk menjaga reputasi serta memenuhi ekspektasi transparansi yang lebih tinggi., termasuk pengungkapan informasi TJSL pada situs internet resmi pemerintah daerah. Oleh karena itu, afiliasi politik dan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya

diasumsikan menunjukkan hubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi TJSL.

*H4 : Kepala daerah yang memiliki afiliasi politik atau kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi TJSL yang lebih tinggi.*

#### **2.11 Hubungan Koalisi Partai Politik di DPRD terhadap Pengungkapan Informasi TJSL pada Situs Internet Resmi Pemerintah Daerah**

Dalam perspektif teori agensi, koalisi partai politik di DPRD berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah sebagai agen dalam menjalankan mandat publik. Koalisi yang kuat dan sejalan dengan kepala daerah dapat menciptakan stabilitas hubungan eksekutif–legislatif, sehingga pengambilan keputusan dan pelaporan kebijakan publik dapat berjalan lebih terarah. Dari sudut pandang teori *stakeholder*, DPRD merupakan representasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah daerah. Koalisi politik yang kuat memperbesar tekanan kelembagaan terhadap pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi sosial dan lingkungan secara jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Holilah & Khaq, (2024) menunjukkan bahwa keselarasan koalisi antara kepala daerah dan partai-partai di DPRD memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran

proses kebijakan. Studi tersebut menemukan bahwa partai koalisi di Bangkalan secara konsisten memberikan dukungan terhadap kebijakan bupati, sehingga proses formulasi dan implementasi program pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, dukungan dari partai koalisi yang memiliki kursi terbanyak memperkuat posisi kepala daerah dalam memastikan realisasi visi dan misinya, karena mereka memiliki pengaruh dominan di arena legislatif dalam menentukan arah kebijakan daerah. Sejalan dengan itu, penelitian Setiawan et al., (2022) menegaskan bahwa *political capacity*, yang diukur dari tingkat dukungan politik legislatif kepada kepala daerah, berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah. Dukungan politik yang kuat memungkinkan pemerintah lebih mudah mengeksekusi program dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena stabilitas politik tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan secara lebih optimal.

Berdasarkan teori agensi dan teori *stakeholder*, koalisi DPRD berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan representasi kepentingan publik yang mendorong akuntabilitas pemerintah daerah. Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, dukungan politik yang kuat di legislatif menciptakan stabilitas kebijakan dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Dalam kondisi tersebut, pengungkapan informasi TJSL menjadi sarana penting untuk menunjukkan transparansi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kepala daerah yang didukung oleh mayoritas koalisi DPRD cenderung mengungkapkan informasi TJSL secara lebih luas.

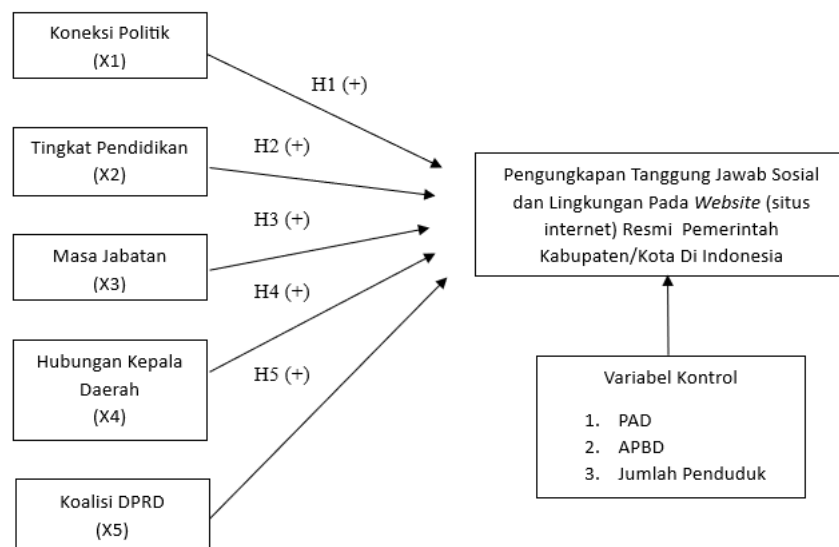
*H5 : Kesamaan koalisi partai politik antara kepala daerah dan mayoritas anggota DPRD berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi TJSL pada situs internet resmi pemerintah daerah.*

## **2.12 Kerangka Penelitian**

Di era pemerintahan yang semakin terbuka, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Pengungkapan ini bukan sekedar bentuk pemenuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Sebagai entitas publik yang berperan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai aktivitas sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui penyajian dan pengungkapan TJSL pada situs internet resmi pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menilai sejauh mana komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Variasi tingkat pengungkapan TJSL antar pemerintah daerah mencerminkan perbedaan karakteristik dan hubungan politik yang dimiliki oleh kepala daerah. Kepala daerah dengan kapasitas kepemimpinan yang baik dan jaringan politik yang sehat cenderung lebih berkomitmen dalam

mendorong transparansi serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, jika hubungan politik digunakan hanya untuk kepentingan tertentu dapat membuat praktik pengungkapan informasi menjadi terbatas dan hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, karakter dan koneksi politik kepala daerah berperan penting dalam membentuk keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah, di mana pengungkapan TJSL menjadi salah satu cara untuk menilai sejauh mana pemerintah berkomitmen terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh publik. Berikut kerangka konseptual penelitian yang akan dilakukan :



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hubungan antar variabel berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Desain penelitian yang digunakan adalah *cross-sectional*, di mana setiap unit analisis diamati satu kali pada satu periode pengamatan. Dalam penelitian ini, variabel independen diukur pada tahun 2024 sedangkan variabel dependen diukur pada tahun 2025. Perbedaan tahun pengukuran tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan hubungan pengaruh yang lebih logis antara variabel independen dan variabel dependen, tanpa menganalisis perubahan antar periode.

##### **3.1.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kuantitatif, data dapat dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder (Hardani et al., 2020).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Data mengenai pengungkapan informasi TJSL dikumpulkan melalui situs internet resmi pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan cara mengakses laman web setiap pemerintah kabupaten/kota, kemudian mencatat ketersediaan dan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan TJSL, baik dalam bentuk dokumen, berita kegiatan, laporan realisasi, ataupun kemitraan dengan pihak swasta.

Sedangkan data mengenai koneksi politik kepala daerah dan karakteristik kepala daerah (seperti tingkat pendidikan, masa jabatan dan afiliasi politik) diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti : Hasil pemilu legislatif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Profil kepala daerah dari situs internet resmi pemerintah daerah dan/atau Kemendagri, dan dari BPS serta publikasi lembaga penelitian atau organisasi pemantau politik lokal.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup seluruh objek atau subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, sehingga populasi tidak terbatas pada individu, tetapi juga dapat berupa objek atau entitas lainnya

(Zulfikar et al., 2024). Sehingga, populasi dapat berjumlah besar maupun kecil sesuai dengan tujuan penelitian dan menjadi dasar utama bagi peneliti dalam memperoleh data serta informasi yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### **3.2.2. Sampel**

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk digeneralisasikan menjadi kesimpulan penelitian. Penggunaan sampel diperlukan apabila populasi besar sehingga peneliti tidak dapat mempelajari seluruh populasi karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga (Zulfikar et al., 2024).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih sejumlah subjek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti guna mencapai tujuan penelitian (Sihotang, 2023). Pendekatan yang diterapkan dalam memilih sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu merupakan metode pengambilan sampel dengan catatan seluruh elemen populasi dijadikan sebagai sampel (Saptutyningsih & Setyaningrum, 2019).

Dalam penelitian ini, sampel mencakup seluruh anggota populasi untuk memberikan gambaran yang akurat dan mewakili keseluruhan. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah

pemerintah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap dan dapat diakses, baik untuk variabel independen maupun variabel dependen. Kabupaten/kota yang tidak menyediakan informasi TJSL pada situs internet resmi pemerintah daerah atau memiliki data karakteristik kepala daerah dan dukungan politik DPRD yang tidak lengkap, atau situs internet resminya tidak dapat diakses karena terblokir dikeluarkan dari sampel penelitian.

Selain itu, pengukuran TJSL dalam penelitian ini dibatasi pada informasi yang tersedia pada website resmi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai representasi utama keterbukaan informasi publik, sehingga data yang diperoleh tetap konsisten dan dapat dibandingkan antar daerah. Meskipun informasi juga dapat tersebar pada website dinas-dinas terkait. Pemilihan sampel berdasarkan kelengkapan data ini dilakukan untuk menjaga validitas analisis dan memastikan bahwa pengujian hubungan antar variabel dapat dilakukan secara akurat.

### **3.3. Metode Analisis Data**

#### **3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan secara umum atau menggeneralisasi (Zulfikar et al., 2024). Statistik ini dapat

digunakan dalam mencari kuat hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel (Mukhid, 2021).

### **3.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda**

Regresi linear berganda merupakan analisis yang mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Sahir, 2021). Pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen.

### **3.3.3. Uji Korelasi dan Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain (Fairuz,

2017). Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance* dan *Value Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

- a. Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance < 0,10 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.
- b. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas > 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas < 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.

#### **3.3.4. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda pada data cross section. Metode regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghazali (2018), analisis data cross section yang diamati dalam beberapa periode waktu menjadikan regresi linear berganda sebagai metode yang tepat untuk mengkaji fenomena yang

bersifat dinamis (Furi, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menilai bagaimana karakteristik dan koneksi politik kepala daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada situs internet resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Persamaan regresi linear berganda dirumuskan :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 K_1 + \beta_7 K_2 + \beta_8 K_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

|                                               |   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Y$                                           | = | Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Website (situs internet) resmi Pemerintah Daerah di Indonesia |
| $\beta_0$                                     | = | Konstanta                                                                                                            |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ | = | Koefisien Regresi                                                                                                    |
| $X_1$                                         | = | Koneksi Politik                                                                                                      |
| $X_2$                                         | = | Tingkat Pendidikan                                                                                                   |
| $X_3$                                         | = | Masa Jabatan                                                                                                         |
| $X_4$                                         | = | Hubungan Dengan Kepala Daerah Sebelumnya                                                                             |
| $X_5$                                         | = | Koalisi DPRD                                                                                                         |
| $K_1$                                         | = | APBD                                                                                                                 |
| $K_2$                                         | = | PAD                                                                                                                  |
| $K_3$                                         | = | Jumlah Penduduk                                                                                                      |
| $E$                                           | = | Error                                                                                                                |

#### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah pengaruh setiap variabel independen bersifat signifikan atau tidak pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 (Adelopa, 2016).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai signifikansi  $>$  dari  $\alpha$  dan arah koefisien regresi tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, maka hipotesis ditolak atau dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Apabila nilai signifikansi  $<$  dari  $\alpha$  dan arah koefisien regresi sejalan dengan hipotesis penelitian, maka hipotesis diterima atau dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **b. Uji F**

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang digunakan. Menurut Ghozali (2013), pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang terbentuk signifikan atau tidak. Uji F dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 5%, di mana model regresi dinyatakan layak dan signifikan apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05,

maka model regresi dinyatakan tidak signifikan (Najib, 2025).

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada pada rentang antara nol hingga satu, di mana nilai yang semakin mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan sebagian besar variasi variabel dependen. Secara umum, nilai koefisien determinasi pada data *cross section* cenderung lebih rendah akibat tingginya variasi antar pengamatan, sedangkan pada data *time series* biasanya menunjukkan nilai  $R^2$  yang lebih tinggi (Fairuz, 2017).

**3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

**3.4.1. Koneksi politik**

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2008 adalah hubungan yang dapat memudahkan segala urusan (kegiatan), sedangkan politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) (Munawaro & Ramdany, 2020). Koneksi politik dapat muncul dalam bentuk kesamaan afiliasi partai politik,

hubungan kekerabatan, atau jaringan politik yang terjalin antara pimpinan dengan pihak-pihak berpengaruh di tingkat lokal maupun nasional yang memungkinkan mereka mempertahankan dan memperluas pengaruhnya, sekaligus mendorong kapasitas sosial dan lingkungan serta tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih tinggi melalui akses sumber daya, dukungan politik, dan tekanan reputasional (Permana, 2023; Wardah & Nugrahaningsih, 2020)

#### **3.4.2. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan menunjukkan sejauh mana level kompetensi yang dimiliki individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang tentu juga mempengaruhi pola dan cara individu dalam berfikir (Hadya & Susanto, 2018). Tingkat pendidikan dalam pemerintahan merupakan salah satu karakteristik penting yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, kemampuan manajerial, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap tata kelola pemerintahan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara lebih efektif (Mahardini & Setiawan, 2022).

#### **3.4.3. Masa Jabatan**

Masa jabatan dalam pemerintahan memiliki implikasi penting terhadap stabilitas kepemimpinan, kinerja birokrasi, dan akuntabilitas publik. Masa jabatan yang relatif panjang dapat memberikan keuntungan berupa kontinuitas kebijakan, akumulasi pengalaman, serta penguatan kapasitas manajerial, sehingga memungkinkan pejabat pemerintah menjalankan program pembangunan secara lebih konsisten dan berorientasi jangka panjang (Feiock, 1998). Akan tetapi, masa jabatan yang panjang juga berpotensi mendorong konsolidasi kekuasaan dan menurunkan tingkat partisipasi publik jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang efektif (Nurhadi & Hidayat, 2024).

#### **3.4.4. Hubungan Dengan Kepala Daerah Sebelumnya**

Dinasti politik adalah kondisi ketika kepala/wakil kepala daerah memiliki hubungan keluarga dengan kepala/wakil kepala daerah pada periode sebelumnya, tetapi juga ketika kepala/wakil kepala daerah memiliki hubungan keluarga dengan kepala/wakil kepala daerah pada periode lainnya atau dengan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah (Setyaningrum & Saragih, 2019). Gómezescobar et al (2007), mengatakan bahwa menempatkan anggota keluarga atau kerabat pada posisi strategis memberikan kemudahan bagi penguasa untuk mengendalikan dan

mengatur berbagai kepentingan yang diperlukan. Salah satu jalur yang dapat dimanfaatkan politisi untuk memperkuat kendali tersebut adalah melalui lembaga legislatif, seperti DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Permana, 2023).

#### **3.4.5. Koalisi DPRD**

Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah (Kaffah et al., 2023). Di area pemerintahan, partai koalisi dengan kursi paling banyak di parlemen, memiliki pengaruh paling besar dalam proses pembentukan kebijakan dan sekaligus paling banyak mendapatkan program realisasi visi misi Bupati (Holilah & Khaq, 2024). Koalisi DPRD adalah kerja sama politik antarpartai di parlemen daerah yang menentukan kekuatan dukungan terhadap kepala daerah. Koalisi yang dominan memiliki peran besar dalam mengarahkan kebijakan dan memastikan kelancaran program pemerintah, termasuk kegiatan sosial dan lingkungan, sehingga dapat berpengaruh terhadap praktik pengungkapan TJSL pemerintah daerah.

#### 3.4.6. Pengungkapan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk perwujudan dan komitmen berkelanjutan yang dilaksanakan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial, ekonomi dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan. Pemerintah dituntut untuk mengerti bahwa tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham saja, tetapi mencakup tanggung jawab yang menyeluruh dan luas serta dapat memberikan kontribusi positif untuk lingkungan masyarakat sekitar (Muliwati & Hariyati, 2021). Tujuan pengungkapan TJSL pemerintah adalah untuk memberikan informasi tentang implementasi dan kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan keberlanjutan, yang dianggap dapat menggambarkan prospek masa depan yang menjanjikan (Sudrajat et al., 2023).

#### 3.5. Skala Pengukuran

| No. | Variabel                                                            | Indikator Perhitungan                                                                                                                                                       | Referensi                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengungkapan TJSL di Situs internet Resmi Pemerintah Kabupaten/Kota | Menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan jumlah item TJSL yang diungkapkan pada situs internet resmi pemerintah kabupaten/kota. Setiap item dihitung satu poin, kemudian | (Joseph, 2010; M. Puspitasari et al., 2023; Tubay & Leon, 2020) |

| No. | Variabel                                         | Indikator Perhitungan                                                                                                                                                                        | Referensi                                      |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                  | dijumlahkan untuk memperoleh skor total TJSL.                                                                                                                                                |                                                |
| 2.  | Koneksi Politik                                  | <div>0 = Bukan berasal dari partai pemenang pemilu legislatif kab/kota</div> <div>1 = Berasal dari partai pemenang pemilu legislatif kab/kota (yang memperoleh jumlah suara terbanyak)</div> | (Darmawan et al., 2021)                        |
| 3.  | Tingkat Pendidikan                               | <div>1 = SMA/Diploma</div> <div>2 = S1</div> <div>3 = S2</div> <div>4 = S3</div>                                                                                                             | (A'lam, 2025; Alexander & Balavac-Orlic, 2022) |
| 4.  | Masa Jabatan                                     | <div>1 = Periode 1</div> <div>2 = Periode 2</div>                                                                                                                                            | (P. S. J. Puspitasari & Ratmono, 2017)         |
| 5.  | Afiliasi Politik Dengan Kepala Daerah Sebelumnya | <div>0 = Jika tidak ada hubungan (keluarga/partai yang sama)</div> <div>1 = Ada hubungan (keluarga/partai yang sama)</div>                                                                   | (Darmawan et al., 2021)                        |
| 6.  | Koalisi DPRD                                     | Persentase kursi = (jumlah kursi partai atau koalisi pengusung)/Total Kursi DPRD x 100                                                                                                       | (Rizky et al., 2021)                           |

| No. | Variabel        | Indikator Perhitungan                                                                    | Referensi             |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                 | Kalau hasilnya >50% = Maka kepala daerah punya dukungan mayoritas di DPRD (koalisi kuat) |                       |
|     |                 | Kalau <50% = Maka dukungannya rendah                                                     |                       |
| 7.  | Tingkat APBD    | Jumlah APBD tahun 2025                                                                   | Portal Data APBD      |
| 8.  | Tingkat PAD     | Jumlah PAD tahun 2025                                                                    | Portal Data APBD      |
| 9.  | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota 2025                                                      | Badan Pusat Statistik |

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil pengolahan data sebanyak 395 observasi pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sedangkan variabel independen terdiri dari koneksi politik, masa jabatan kepala daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, hubungan kepala daerah, koalisi DPRD, dengan variabel kontrol terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta jumlah penduduk.

**Tabel 3.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel               | Obs | Mean     | Std. dev. | Min      | Max      |
|------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|
| TJSL                   | 395 | 10.984   | 3.984     | 1        | 19       |
| Koneksi Politik        | 395 | 0.410    | 0.492     | 0        | 1        |
| Masa Jabatan           | 395 | 1.258    | 0.438     | 1        | 2        |
| Tingkat Pendidikan     | 395 | 2.612    | 0.763     | 1        | 4        |
| Hubungan Kepala Daerah | 395 | 0.379    | 0.485     | 0        | 1        |
| Koalisi DPRD           | 395 | 0.501    | 0.258     | 0        | 1        |
| APDD                   | 395 | 6.34e+12 | 1.91e+13  | 2.99e+11 | 2.47e+14 |
| PAD                    | 395 | 1.14e+12 | 5.66e+12  | 2.00e+09 | 4.61e+13 |
| Penduduk               | 395 | 598125.7 | 718397.4  | 28800    | 5720000  |

*Sumber : Hasil Data yang diolah StataMP17*

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata indeks TJSL sebesar 10,98481 dengan standar deviasi sebesar 3,984713. Nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 19 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam implementasi TJSL antar pemerintah daerah. Variasi ini mengindikasikan bahwa tidak semua daerah memiliki tingkat perhatian dan pelaksanaan TJSL yang sama, sehingga terdapat kesenjangan dalam implementasi program sosial dan lingkungan di tingkat daerah.

Variabel koneksi politik memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4101266 dengan standar deviasi sebesar 0,4924802. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 41% kepala daerah dalam sampel memiliki koneksi politik, sedangkan sisanya tidak memiliki koneksi tersebut. Variabel masa jabatan memiliki nilai rata-rata sebesar 1,258228 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kepala daerah berada pada periode awal hingga pertengahan masa jabatannya. Tingkat pendidikan kepala daerah memiliki rata-rata sebesar 2,612658 yang menunjukkan bahwa mayoritas kepala daerah memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi.

Selanjutnya, variabel hubungan kepala daerah memiliki rata-rata sebesar 0,3797468 yang menunjukkan bahwa sekitar 37,9% kepala daerah memiliki hubungan tertentu dalam konteks politik atau pemerintahan. Variabel koalisi DPRD memiliki rata-rata

sebesar 0,5012985 yang mengindikasikan bahwa sekitar setengah dari pemerintah daerah memiliki dukungan koalisi di DPRD.

Dari sisi variabel keuangan daerah, nilai rata-rata APBD sebesar  $6,34 \times 10^{12}$  dengan standar deviasi yang cukup besar, yaitu  $1,91 \times 10^{13}$ . Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam kapasitas fiskal antar daerah. Sementara itu, PAD memiliki rata-rata sebesar  $1,14 \times 10^{12}$  dengan variasi yang juga cukup tinggi. Variabel jumlah penduduk memiliki rata-rata sebesar 598.125 jiwa dengan nilai minimum sebesar 28.800 dan maksimum sebesar 5.720.000 jiwa, yang menunjukkan adanya perbedaan skala wilayah yang cukup besar dalam penelitian ini.

#### 4.1.2. Uji Korelasi dan Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 4.** Matriks Korelasi

|      | VIF  | TJSL   | KP     | MJ     | TP     | HKD    | DPRD   | APBD  | PAD   | PDK   |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| TJSL | -    | 1.000  |        |        |        |        |        |       |       |       |
| KP   | 1.41 | -0.004 | 1.000  |        |        |        |        |       |       |       |
| MJ   | 1.24 | 0.043  | 0.237  | 1.000  |        |        |        |       |       |       |
| TP   | 1.03 | 0.003  | 0.032  | 0.117  | 1.000  |        |        |       |       |       |
| HKD  | 1.57 | 0.027  | 0.514  | 0.384  | 0.075  | 1.000  |        |       |       |       |
| DPRD | 1.38 | 0.120  | 0.348  | 0.329  | 0.141  | 0.392  | 1.000  |       |       |       |
| APBD | 2.42 | -0.054 | -0.024 | 0.010  | -0.022 | -0.025 | -0.152 | 1.000 |       |       |
| PAD  | 2.51 | -0.105 | -0.089 | -0.059 | -0.010 | -0.087 | -0.227 | 0.759 | 1.000 |       |
| PDK  | 1.16 | 0.157  | 0.066  | 0.057  | 0.082  | 0.016  | 0.090  | 0.301 | 0.301 | 1.000 |

*Sumber : Hasil Data yang diolah StataMP17*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, dengan nilai rata-rata VIF sebesar 1,59. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel PAD sebesar 2,51 dan APBD sebesar 2,42, sedangkan variabel lainnya memiliki nilai VIF yang lebih rendah.

Nilai VIF yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius dalam model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara independen tanpa adanya gangguan hubungan linear yang kuat antar variabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil estimasi regresi yang diperoleh bersifat stabil dan dapat diinterpretasikan dengan baik.

#### 4.1.3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

**Tabel 5.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel        | Coefficient | t-stat |
|-----------------|-------------|--------|
| Konstanta       | 10.1978     | 11.51  |
| Koneksi Politik | -0.550      | -1.16  |
| Masa Jabatan    | 0.075       | 0.15   |

|                        |        |       |
|------------------------|--------|-------|
| Tingkat Pendidikan     | -0.149 | -0.57 |
| Hubungan Kepala Daerah | 0.093  | 0.18  |
| Koalisi DPRD           | 1.394  | 1.56  |
| APDD                   | 5.610  | 0.35  |
| PAD                    | -1.200 | -2.18 |
| Penduduk               | 1.100  | 3.75  |
| R-squared              | 0.0600 |       |
| Adj R-squared          | 0.0405 |       |
| F-statistic            | 3.07   |       |
| Prob. (F-statistic)    | 0.0023 |       |

*Sumber : Hasil Data yang diolah StataMP17*

Nilai konstanta sebesar 10,1978 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai indeks TJSL diperkirakan sebesar 10,1978. Koefisien masing-masing variabel menunjukkan arah dan besarnya pengaruh terhadap indeks TJSL.

Model regresi memiliki nilai R-squared sebesar 0,0600 yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 6% variasi indeks TJSL. Sementara itu, sisanya sebesar 94% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,0405 juga menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen masih relatif rendah.

Namun demikian, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F-statistik sebesar 3,07 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0023. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan

bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks TJSL.

#### 4.1.4. Uji Hipotesis

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variasi pengaruh antar variabel independen terhadap indeks TJSL. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ )

**Tabel 6.** Hasil Uji Hipotesis

| Variabel               | p-value | Keputusan  |
|------------------------|---------|------------|
| Koneksi Politik        | 0.247   | H1 ditolak |
| Masa Jabatan           | 0.879   | H2 ditolak |
| Tingkat Pendidikan     | 0.568   | H3 ditolak |
| Hubungan Kepala Daerah | 0.853   | H4 ditolak |
| Koalisi DPRD           | 0.119   | H4 ditolak |

*Sumber : Hasil Data yang diolah StataMP17*

Variabel koneksi politik memiliki koefisien sebesar -0,5504 dengan nilai signifikansi sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks TJSL. Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa adanya koneksi politik cenderung menurunkan indeks TJSL, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

Variabel masa jabatan memiliki koefisien sebesar 0,0759 dengan nilai signifikansi sebesar 0,879. Hal ini menunjukkan bahwa

lama masa jabatan kepala daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat implementasi TJSL. Dengan kata lain, pengalaman menjabat tidak secara otomatis meningkatkan perhatian terhadap TJSL.

Tingkat pendidikan kepala daerah memiliki koefisien sebesar -0,1495 dengan nilai signifikansi sebesar 0,568. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap TJSL. Meskipun secara teoritis pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dalam konteks ini pengaruh tersebut tidak terbukti secara empiris.

Variabel hubungan kepala daerah memiliki koefisien sebesar 0,0938 dengan nilai signifikansi sebesar 0,853. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang dimiliki kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap TJSL.

Koalisi DPRD memiliki koefisien sebesar 1,3949 dengan nilai signifikansi sebesar 0,119. Meskipun menunjukkan arah positif, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan politik di DPRD belum tentu mendorong peningkatan TJSL.

Variabel APBD memiliki koefisien yang sangat kecil dan nilai signifikansi sebesar 0,727, yang menunjukkan bahwa besarnya anggaran daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap TJSL. Hal

ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya anggaran belum tentu mencerminkan prioritas terhadap program sosial dan lingkungan.

Sebaliknya, PAD memiliki koefisien negatif sebesar  $-1,20E-13$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,030. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TJSL. Artinya, semakin tinggi PAD, terdapat kecenderungan penurunan indeks TJSL.

Variabel jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar  $1,10E-06$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap TJSL. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan program TJSL.

#### **4.2 Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan demografis lebih berperan dalam mempengaruhi TJSL dibandingkan faktor politik dan karakteristik kepala daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TJSL. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan fiskal suatu daerah, tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan pelaksanaan TJSL.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif alokasi anggaran, di mana pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi memiliki

fleksibilitas dalam menentukan prioritas belanja. Dalam praktiknya, pemerintah cenderung menghadapi trade-off dalam pengalokasian anggaran antara sektor sosial dan sektor produktif seperti infrastruktur. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan maupun ketersediaan sumber daya fiskal mendorong pemerintah untuk memprioritaskan sektor tertentu, sehingga peningkatan belanja pada sektor produktif berpotensi mengurangi alokasi pada program sosial dan lingkungan (Nasution & Wahyudi, 2017).

Di sisi lain, jumlah penduduk yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan akan program sosial dan lingkungan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori legitimasi, di mana pemerintah daerah berupaya memenuhi ekspektasi masyarakat guna mempertahankan legitimasi sosialnya. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan semakin banyak stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan potensi tekanan publik (*public pressure*). Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menyediakan serta mengimplementasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa tingkat visibilitas dan tekanan publik yang tinggi akan mendorong organisasi untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya (Li et al., 2019).

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan pada sektor

pemerintahan masih relatif lemah dibandingkan sektor swasta, khususnya perusahaan terbuka (listed companies) (CIPFA, 2021; Stefanescu, 2021). Kondisi tersebut dapat dipahami karena regulasi dan standar pengungkapan keberlanjutan di sektor swasta berkembang lebih cepat dibandingkan sektor publik. Di Indonesia, kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mendorong perusahaan terbuka untuk menyusun serta mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lebih sistematis.

Sementara itu, sektor pemerintahan belum memiliki standar pengungkapan keberlanjutan yang sekomprehensif sektor korporasi, sehingga praktik pengungkapan TJSL di pemerintah daerah masih bersifat terbatas dan belum terstandarisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa institusionalisasi praktik keberlanjutan pada sektor publik masih berada pada tahap berkembang.

Di sisi lain, perkembangan standar keberlanjutan di Indonesia semakin mengarah pada adopsi IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1 dan IFRS S2) yang dikembangkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Standar tersebut menjadi kerangka global dalam pengungkapan informasi keberlanjutan dan mulai diadopsi dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia (Ikatan

Akuntan Indonesia, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia saat ini lebih terarah pada sektor korporasi dibandingkan sektor pemerintahan. Oleh karena itu, lemahnya pengaruh variabel politik terhadap TJSL dalam penelitian ini diduga berkaitan dengan masih rendahnya tingkat institusionalisasi pengungkapan keberlanjutan di lingkungan pemerintah daerah.

Selain tekanan regulasi, pengungkapan keberlanjutan pada sektor publik juga cenderung berkembang lebih lambat karena orientasi akuntabilitas pemerintah daerah masih berfokus pada pelaporan keuangan dan kepatuhan anggaran dibandingkan pengungkapan sosial dan lingkungan (OECD Publishing, 2025). Berbeda dengan perusahaan publik yang menghadapi tekanan investor, pasar modal, dan pemangku kepentingan global, pemerintah daerah belum menghadapi tuntutan yang sama kuatnya terkait sustainability disclosure (KPMG International, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan implementasi dan pengungkapan TJSL pada sektor pemerintahan belum menjadi prioritas utama dibandingkan sektor swasta.

Tidak signifikannya variabel politik seperti koneksi politik, koalisi DPRD, dan hubungan kepala daerah menunjukkan bahwa implementasi TJSL belum sepenuhnya dipengaruhi oleh dinamika politik. Hal ini dapat diartikan bahwa TJSL lebih bersifat administratif atau kebutuhan praktis dibandingkan sebagai alat politik.

Sementara itu, variabel koneksi politik tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap TJSL. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan politik kepala daerah tidak menjadi faktor utama dalam mendorong implementasi TJSL. Secara teoritis, pengaruh koneksi politik terhadap tanggung jawab sosial bersifat tidak konsisten dan sangat bergantung pada konteks institusional serta tekanan eksternal yang dihadapi organisasi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa koneksi politik dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan, di mana perusahaan atau organisasi yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini disebabkan oleh adanya akses terhadap kekuasaan dan dukungan politik yang mengurangi tekanan eksternal dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Sehingga koneksi politik tidak selalu mendorong peningkatan TJSL, karena rendahnya tekanan eksternal dapat mengurangi kebutuhan organisasi untuk meningkatkan tanggung jawab sosial (Hung et al., 2018).

Variabel masa jabatan kepala daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap TJSL. Hal ini mengindikasikan bahwa lamanya masa jabatan tidak menjamin peningkatan perhatian terhadap program sosial dan lingkungan. Meskipun secara teoritis masa jabatan yang lebih lama dapat meningkatkan pengalaman dan kapasitas pengambilan keputusan, namun dalam praktiknya kebijakan TJSL tidak hanya ditentukan oleh individu

pemimpin, melainkan juga oleh sistem birokrasi dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa karakteristik individu pemimpin tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap hasil organisasi, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan (Mai et al., 2022).

Selanjutnya, variabel tingkat pendidikan kepala daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap TJSL. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal tidak menjadi determinan utama dalam pengambilan kebijakan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun pendidikan tinggi diasumsikan meningkatkan kesadaran terhadap isu keberlanjutan, dalam praktik pemerintahan keputusan kebijakan lebih dipengaruhi oleh faktor struktural dan kebutuhan daerah. Temuan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh pemimpin terhadap kinerja sektor publik relatif terbatas, karena outcome organisasi lebih banyak ditentukan oleh faktor struktural dan institusional dibandingkan karakteristik individu pemimpin. Oleh karena itu, tingkat pendidikan kepala daerah tidak secara langsung menjadi determinan utama dalam pengambilan kebijakan TJSL (Karadag et al., 2015).

Variabel hubungan dengan kepala daerah sebelumnya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap TJSL. Hal ini menunjukkan bahwa kesinambungan politik atau afiliasi dengan pemimpin sebelumnya tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan TJSL. Kondisi ini dapat

disebabkan oleh adanya perubahan prioritas kebijakan pada setiap periode kepemimpinan serta dominannya pengaruh sistem birokrasi dibandingkan faktor relasi politik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh hubungan personal antar pemimpin, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika institusional dan sistem birokrasi yang lebih luas (Bisri, 2017; Wakhid, 2013).

Selain itu, variabel koalisi DPRD tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap TJSL. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan politik dari legislatif belum tentu mendorong peningkatan implementasi TJSL. Secara teoritis, koalisi yang kuat memang dapat memperlancar pengambilan keputusan, namun dalam konteks TJSL, kebijakan yang diambil lebih bersifat administratif dan berbasis kebutuhan masyarakat daripada kepentingan politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor politik tidak selalu menjadi determinan utama dalam praktik tanggung jawab sosial, terutama ketika terdapat tekanan eksternal yang lebih dominan (Mihret & Khan, 2018).

Terakhir, variabel APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap TJSL. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran daerah tidak secara langsung menentukan tingkat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kondisi ini dapat terjadi karena alokasi APBD lebih difokuskan pada belanja wajib dan prioritas pembangunan lainnya, sehingga porsi untuk TJSL menjadi relatif kecil atau tidak menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa

pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga harus menentukan prioritas dalam pengalokasian anggaran, di mana tidak semua sektor memperoleh porsi yang sama (Nasution & Wahyudi, 2017). Selain itu, peningkatan belanja pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan outcome sosial dan lingkungan, karena dipengaruhi oleh faktor struktural dan efektivitas implementasi kebijakan (Firmansyah, 2025).

Secara keseluruhan, tidak terdukungnya seluruh hipotesis penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan TJSL pada pemerintah daerah belum dipengaruhi secara kuat oleh faktor politik maupun karakteristik kepala daerah. Kondisi ini diduga karena praktik TJSL pada sektor pemerintahan daerah masih bersifat administratif dan belum terinstitusionalisasi secara kuat seperti pada sektor korporasi. Selain itu, belum adanya standar pengungkapan TJSL yang seragam menyebabkan implementasi dan tingkat pengungkapan TJSL antar daerah masih sangat bervariasi. Pemerintah daerah juga cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan kewajiban administratif, pengelolaan anggaran, dan program pembangunan daerah dibandingkan pengungkapan sosial dan lingkungan. Akibatnya, koneksi politik, masa jabatan, tingkat pendidikan, hubungan kepala daerah sebelumnya, dan koalisi DPRD belum mampu menjadi faktor utama yang mendorong pengungkapan TJSL. Temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan TJSL pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh kebutuhan praktis dan kondisi daerah dibandingkan dinamika politik kepala daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 395 pemerintah kabupaten/kota yang di analisis melalui regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yang terdiri dari koneksi politik, masa jabatan, tingkat pendidikan, hubungan kepala daerah, koalisi DPRD, APBD, PAD, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks TJSL. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor politik, karakteristik individu, serta kondisi ekonomi dan demografis secara bersama-sama mempengaruhi implementasi TJSL.

Namun, secara parsial hanya variabel PAD dan jumlah penduduk yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap TJSL. Variabel PAD memiliki pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan fiskal daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan implementasi TJSL. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor lain yang dianggap lebih strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan belanja produktif. Sementara itu, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap TJSL, yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin tinggi kebutuhan sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Dengan demikian, tekanan dan tuntutan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong implementasi TJSL.

Di sisi lain, variabel koneksi politik, masa jabatan, tingkat pendidikan, hubungan kepala daerah, koalisi DPRD, dan APBD tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap TJSL. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi TJSL pada pemerintah daerah belum sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor politik maupun karakteristik individu kepala daerah. Kebijakan TJSL cenderung lebih dipengaruhi oleh kebutuhan praktis masyarakat dan kondisi struktural daerah dibandingkan dinamika politik.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan pada sektor pemerintahan masih relatif terbatas dibandingkan sektor korporasi. Regulasi dan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia saat ini lebih berkembang pada sektor swasta, khususnya perusahaan terbuka, sedangkan sektor pemerintahan belum memiliki standar pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif dan terstandarisasi. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi TJSL di pemerintah daerah belum menjadi prioritas utama dan masih berada pada tahap perkembangan institusional.

Selain itu, rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak faktor lain di luar model penelitian yang mempengaruhi TJSL. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena implementasi TJSL secara menyeluruh.

## **5.2. Implikasi**

### **5.2.1. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada pemerintah daerah. Temuan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan terhadap TJSL menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas fiskal daerah dengan implementasi tanggung jawab sosialnya. Secara teoritis, hal ini menantang asumsi dalam teori keagenan dan teori legitimasi yang menyatakan bahwa semakin besar sumber daya yang dimiliki organisasi, maka semakin besar pula dorongan untuk meningkatkan legitimasi melalui aktivitas sosial. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dengan PAD tinggi justru tidak secara otomatis meningkatkan aktivitas TJSL, yang mengindikasikan adanya faktor lain seperti prioritas anggaran atau orientasi kebijakan yang lebih dominan.

Selain itu, temuan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap TJSL memperkuat perspektif teori legitimasi dan teori stakeholder. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi tekanan sosial yang diterima pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melalui program TJSL. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa tekanan masyarakat memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan faktor internal seperti karakteristik kepala daerah maupun aspek politik.

Sementara itu, tidak signifikkannya variabel politik dan karakteristik kepala daerah, seperti koneksi politik, masa jabatan, tingkat pendidikan, hubungan kepala daerah, serta koalisi DPRD, memberikan implikasi bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut belum mampu menjelaskan variasi implementasi TJSL. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel lain yang lebih relevan, seperti kualitas tata kelola, transparansi, atau tekanan institusional.

#### **5.2.2. Implikasi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait TJSL. Temuan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap TJSL menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap prioritas penggunaan anggaran. Peningkatan PAD seharusnya tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program-program sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, pengaruh positif jumlah penduduk terhadap TJSL menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek demografis dalam perencanaan kebijakan. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung memiliki kebutuhan sosial yang lebih kompleks, sehingga diperlukan program TJSL yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa faktor politik belum menjadi pendorong utama dalam implementasi TJSL. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menekankan aspek profesionalitas dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan TJSL, bukan semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dengan demikian, program TJSL dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

### **5.3. Keterbatasan dan Saran**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Keterbatasan variabel penelitian**

Penelitian ini hanya menggunakan variabel koneksi politik, masa jabatan, tingkat pendidikan, hubungan kepala daerah, koalisi DPRD, APBD, PAD, dan jumlah penduduk dalam menjelaskan variasi TJSL. Sementara itu, hasil koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa masih terdapat banyak variabel lain yang belum dimasukkan dalam model, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, serta faktor sosial dan institusional lainnya. Keterbatasan ini menyebabkan kemampuan model dalam menjelaskan fenomena TJSL menjadi belum optimal.

#### **2. Keterbatasan data sekunder**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman informasi. Data yang digunakan hanya mencerminkan kondisi yang telah terdokumentasi, sehingga tidak dapat menangkap aspek kualitatif seperti motivasi kebijakan, dinamika internal pemerintah daerah, maupun faktor sosial yang tidak terukur secara kuantitatif.

### 3. Keterbatasan Periode Pengamatan

Periode pengamatan yang relatif terbatas, sehingga belum mampu menggambarkan perkembangan dan konsistensi pengungkapan TJSL pemerintah daerah dalam jangka panjang. Perubahan kondisi politik, ekonomi, maupun kebijakan pada periode tertentu dapat mempengaruhi hasil penelitian dan menyebabkan hubungan antar variabel belum terlihat secara signifikan.

### 4. Keterbatasan Regulasi

Praktik pengungkapan TJSL pada pemerintah daerah di Indonesia masih belum memiliki standar pengungkapan seperti pada sektor korporasi. Sehingga menyebabkan variasi tingkat pengungkapan antar daerah menjadi cukup tinggi. Kondisi tersebut mempengaruhi hasil penelitian dan menyebabkan hubungan antar variabel menjadi tidak signifikan secara statistik.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah :

#### 1. Penambahan variabel penelitian yang lebih komprehensif

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih relevan, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat transparansi, akuntabilitas publik, indeks pembangunan manusia, serta tekanan masyarakat. Penambahan variabel ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan TJSL secara lebih menyeluruh.

#### 2. Perluasan periode dan cakupan penelitian

Disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang serta mencakup lebih banyak daerah agar hasil penelitian menjadi lebih

representatif dan mampu menangkap dinamika perubahan TJSL dari waktu ke waktu.

3. Penggunaan data primer atau pendekatan kualitatif

Penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan data kuantitatif dengan data kualitatif, seperti wawancara atau studi kasus, untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi TJSL, terutama yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

## REFERENSI

- Čiřmancová, E., & Soviar, J. (2024). The Sustainability of Local Governments — Evidence from the Online Environment in the Slovak Republic. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, 1–29.
- A'lam, N. S. (2025). *Pengaruh Keadilan, Literasi dan Kepuasan Hidup Terhadap Moralitas Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Adelopa, K. F. (2016). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi*.
- Al-akayleh, W., & Aviation, J. (2022). Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure : An Empirical Study On Jordanian Firms Listed On Amman Stock Exchange. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 26(2), 1–18.
- Alexander, P., & Balavac-Orlic, M. (2022). Tax Morale: Framing and Fairness Phyllis. *Economic Systems*, 46(1), 1–52.
- Alsayegh, M. F., Ditta, A., & Mahmood, Z. (2023). The Role of Sustainability Reporting and Governance in Achieving Sustainable Development Goals : An International Investigation. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*.
- An, Y., Davey, H., Harun, H., Jin, Z., Qiao, X., & Yu, Q. (2019). Online sustainability reporting at universities : the case of Hong Kong. *Sustainability Accounting , Management and Policy Journal*. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2018-0161>
- Ardi, D. F. I., Santoso, D., & Nursanty. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs WEB (Media Center) Diskominfo Kota Bengkulu. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik*.
- Arif, I., & Dutta, N. (2024). Legitimacy of government and governance. *Journal of Institutional Economics*, 20, 1–23. <https://doi.org/10.1017/S1744137423000334>
- Bisri, M. H. (2017). Kontrol Politik Birokrasi Dlam Kebijakan Publik. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* |, 2(2), 121–129.
- Cahyono, S., Sawarjuwono, T., Wendi, W., Airlangga, U., No, J. A., Belitung, U. B., No, G. I. V, Ijuk, B., & Belitung, B. (2023). Masa Jabatan CEO , Keragaman Dewan Direktur , dan Pengungkapan CSR : Eksplorasi Studi Kepustakaan Indonesia. *Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(1), 54–68.
- CIPFA. (2021). *Public sector lags behind private sector on climate reporting*. Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).

<https://www.cipfa.org/about-cipfa/press-office/latest-press-releases/public-sector-lags-private-sector-on-climate-reporting?>

- Darmawan, A., Nazar, S. N., Wulandari, R., & Afridayani. (2021). *Fraud Pentagon dan Fraudulent Financial Statements di Property, Real Estate, dan Building Constructions* (Issue 35).
- Debby, K. S., Riyanto, B., & Keziasarfat@gmail.com, H. K. A. (2024). Website Sebagai Media Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik Kota Surakarta. *Development and Business Communication Journal*, 01(02), 135–149.
- Endiana, I. D. M., & Suryandari, N. N. A. (2017). Opini Going Concern: Ditinjau Dari Agensi Teori Dan Pemicunya. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(2), 223–242. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4490.p-ISSN>
- Ernungtyas, N. F., & Boer, R. F. (2023). The Information of Government ' s Social Media and Websites to Citizen Engagement in Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 14–26.
- Faccio, M. (2004). *Politically Connected Firms*.
- Fairuz, A. A. (2017). *Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Pasar, Inflasi Dan Kurs Terhadap Return Saham Syariah (Studi Pada Saham Syariah Yang Tergabung Dalam Kelompok Issi Pada Sektor Industri Tahun 2011-2015)*.
- Feiock, R. C. (1998). Explaining the Tenure of Local Government Managers. *Journal of Public Administration Research and Theor*, 8(1), 117–130.
- Firmansyah, A. (2025). Assessing The Readiness of Local Governments for Sustainability Reporting in Indonesia : A Policy and Institutional Analysis. *Journal of International Public Sector Accounting Review*, 3(1), 25–47.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management*. Pitman Publisihing Inc.
- Furi, R. A. (2024). *Pengaruh Efektivitas Xbrl Terhadap Tax Avoidance Dengan Pemoderasi Kepemilikan Manajerial Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*.
- Georgieva, D. (2025). Sustainability Reporting in Public Sector Organizations. *Electronic Journal "Economics And Computer Science," 1*, 40–48.
- Hadya, R., & Susanto, R. (2018). Model Hubungan Antara Keberagaman Gender, Pendidikan Dan Nationality Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Benefita*, 3(2), 149–160. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3432>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

- Harmoni, A. (2010). Pemanfaatan Laman Resmi Sebagai Media Pengungkapan Tanggung Jawa Sosial Perusahaan/CSR Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), 9–17.
- Hawrysz, L., & Foltys, J. (2015). Environmental Aspects of Social Responsibility of Public Sector Organizations. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*. <https://doi.org/10.3390/su8010019>
- Holilah, & Khaq, Z. (2024). Implikasi Koalisi Partai pada Proses Pembentukan Kebijakan di Daerah (Studi di Pilkada Bangkalan Tahun 2018). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 28–45. <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.17565>
- Hung, M., Kim, Y., & Li, S. (2018). Political connections and voluntary disclosure : Evidence from around the world. *Journal of International Business Studies*. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0139-z>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *IAI Luncurkan “Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan” Mewujudkan Transparansi dan Menjaga Daya Saing Nasional*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). [https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/iai\\_luncurkan\\_peta\\_jalan\\_standar\\_pengungkapan\\_keberlanjutan\\_mewujudkan\\_transparansi\\_dan\\_menjaga\\_daya\\_saing\\_nasional#gsc.tab=0](https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/iai_luncurkan_peta_jalan_standar_pengungkapan_keberlanjutan_mewujudkan_transparansi_dan_menjaga_daya_saing_nasional#gsc.tab=0)
- Irawati, S., Hayat, A., Juniar, A., & Handayani, S. A. (2024). Exploring Accountability and Transparency in Government Agency Management: A Literature Review Syati. *Ilomata International Journal of Management*, 5(3), 743–762.
- Joseph, C. (2010). Content Analysis of Sustainability Reporting on Malaysian Local. *The Journal of Administrative Science*, 7(1), 101–125.
- Kaffah, F., Hasanuddin, & Marta, A. (2023). Dinamika Pembentukan Koalisi Partai Politik Pada Pilkada Dynamics of Political Party Coalition Formation in Regional Head Elections. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 499–506. <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Karadag, E., Bektas, F., Cogaltay, N., & Yalcim, M. (2015). The effect of educational leadership on students ’ achievement : a meta-analysis study. *Asia Pacific Educ*, 16, 79–93. <https://doi.org/10.1007/s12564-015-9357-x>
- KPMG International. (2022). *Big shifts , small steps. Survey of Sustainability Reporting 2022* (Issue October).
- Kumar, S. (2023). A Review Esg Performance As A Measure Of Stakeholders Theory. *Academy of Marketing Studies Journal*, 27(3), 1–18.
- Kwalomine, A. L. (2018). Pendidikan, Masa Jabatan Direktur Utama Dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (Csr). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(1), 72–82. <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i1.4224>
- León-silva, J. M., Dasí-gonzález, R. M., & Montesinos, V. (2022). Determinants of

- sustainability information disclosure of local governments in Latin America. *Spanish Accounting Review*, 25(2), 244–256.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Li, F., Morris, T., & Young, B. (2019). The Effect of Corporate Visibility on Corporate Social Responsibility. *MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)*, 1–16.
- Ma, Y., Li, J., Yang, L., Hu, Y., & Gao, K. (2019). Relationship Between a CEO ' s Level of Education and Corporate Social Responsibility : Evidence from Chinese Listed Firms. *International Journal of Business and Economics Research*, 8(4), 232–244. <https://doi.org/10.11648/j.ijber.20190804.18>
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Mahardini, N. Y., & Setiawan, D. (2022). Do Characteristics And Political Background Of Regional Heads Influence Financial Performance Of Local Governments In Indonesia ? *International Journal Of Science, Technology & Management*, 3(4), 845–855.
- Mai, N. K., Do, T. T., & Phan, N. A. (2022). Journal of Innovation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100204>
- Mardiana, F., Suprayoga, & Pratiwi, L. I. (2024). Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan Literatur dari Berbagai Negara. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1073–1084. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2131>
- Matuszak, Ł., Ró'za'nska, E., & Szczepankiewicz, E. I. (2025). Assessment of the Compliance of Environmental Disclosures by Energy Companies Using GRI Standards with European Sustainability Reporting Standards : A Case Study. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*.
- Maulana, H. R., Oktaviani, Y., Novida, I., & Rizfalefriadi, A. (2023). Jurnal maneksi vol 12, no. 1, maret 2023. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 43–49.
- Mayshelly, E. (2022). *Kinerja Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020*. Universitas Islam Indonesia.
- Meutia, I., Kartasari, S. F., & Yaacob, Z. (2022). Stakeholder or Legitimacy Theory ? The Rationale behind a Company ' s Materiality Analysis : Evidence from Indonesia. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*.
- Mihret, M. B. M. D. G., & Khan, A. (2018). Corporate political connection and corporate social responsibility disclosures: a neo-pluralist hypothesis and

- empirical evidence. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 725–744. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2078>
- Moe, T. (1984). The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4), 739–777. <https://doi.org/10.2307/2110997>
- Mukhid, A. (2021). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (S. R. Wahyuningrum (ed.)). CV. Jakad Media Publishing.
- Muliwati, A. R., & Hariyati. (2021). Pengaruh Koneksi Politik Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 72–82. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2509>
- Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2020). Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109–121. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.70>
- Munawaroh, S. (2025). Public Sector Transformation in Sustainability Era : Green Economy Policies and Community Welfare. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 899–908. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3718>
- Mwandu, R. P. (2023). Corporate Social Responsibility Investment By Public Sector Organisations : A Systematic Literature Review. *African Journal of Accounting and Financial Research*, 6(4), 104–123. <https://doi.org/10.52589/AJAFR-FFEJXBPT>
- Najib, M. R. B. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)*.
- Nararya, S., Abdullah, S., Widyaswati, R., Tunas, U., & Surakarta, P. (2024). The Power of Knowledge : How CEO Education Shapes CSR Transparency in Indonesian Banks. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 30(2), 126–144.
- Nasution, M. E., & Wahyudi, I. (2017). Government fiscal policy impact analysis in infrastructure sector and education sector to improve public welfare. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(1), 51–65. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss1.art6>
- Nata, K., & Aziza, N. (2025). Disclosure of Local Government Social Responsibility Through GRI Reporting Standards : A Case Study of Bengkulu Province. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(3), 2287–2298.
- Nugraheni, N., Zuhroh, S., & Paramitha, D. (2025). *Accountability In Public Sector Sustainability Report*. 249–254. <https://doi.org/10.4108/eai.11-9-2024.2354426>
- Nurhadi, S., & Hidayat, F. (2024). Political Stability Versus Local Oligarchy : The Impact of Long Tenure in Village Governance in Indonesia Sandi. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 33–46.

- Nurhandika, A., Fitriani, C., Teguh, I., & Rahimi, F. (2024). Afiliasi Politik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol.*, 22(3), 252–260. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9206>
- OECD Publishing. (2025). Advancing public sector sustainability reporting: Insights from past reforms. In *OECD Papers on Budgeting* (Vol. 05). <https://doi.org/10.1787/ad5fb10f-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Otoritas Jasa Keuangan Gelar Konsultasi Publik atas Perubahan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/ArticleList/View/2049?>
- Permana, D. (2023). Political Dynasties in the Government System in Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(3), 153–163.
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *National Conference on Accounting & Finance*, 6, 77–87.
- Prayudi. (2019). Hubungan DPRD Dan Kepala Daerah: Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah. *Jurnal.DPR*, 205–221.
- Puspitasari, M., Ardiyansyah, C., & Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. (2023). Can a Village Website Be an Indicator of Public Transparency? *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 295–309. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i2.303>
- Puspitasari, P. S. J., & Ratmono, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Daerah Di Pulaujawa Dan Bali. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1–15.
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the Sustainable Development Goals into a Regional Development Plan in Indonesia. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*.
- Rahman, G. D. A., Andani, M., & Abnaina, E. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Return On Assets (ROA) dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 1–20.
- Rizky, H. P., Setiawan, D., & Winarna, J. (2021). The Role Of Coalition Parties And Local Government Expenditure: Evidence From The Developing Country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 5(2), 82–89. <https://doi.org/10.22495/cgobrv5i2p8>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); 1st ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Saptutyningsih, E., & Setyaningrum, E. (2019). *Penelitian Kuantitatif Metode dan*

*Alat Analisis* (1st ed.). Gosyen Publishing.

- Sayadi, M. H., Setiawan, D., Aryani, Y. A., & Hartoko, S. (2025). Stakeholders and web-based environmental disclosure. *International Conference on Accounting & Finance*, 3, 233–241.
- Septiana, V. A., & Aminah. (2025). Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR): Legitimacy Theory Perspective. *International Journal of Education, Social Studies, And Management*, 5(1), 374–392.
- Septiany, S., Mirabelle, E., Harsono, B., Tang, S., & Serly. (2025). CEO Tenure And Sustainability Performance: The Role Of Institutional Ownership And Board Independence. *Global Financial Accounting Journal*, 9(01), 41–55.
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery : Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, 1–13.
- Setyaningrum, D., & Saragih, H. A. (2019). Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 135–144. <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2.11636>
- Sihotang, H. (2023). *Metode penelitian kuantitatif* (E. Murniarti (ed.); 1st ed.). UKI Press. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Soemaryono, & Ismangil. (2023). Pengaruh koneksi politik dan biaya terhadap kinerja perusahaan sektor Pertambangan. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 2(2), 69–74. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i2.2000>
- Stefanescu, C. A. (2021). Sustainability Reporting in the Public Realm — Trends and Patterns in Knowledge Development. *MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)*, 13, 1–23.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy : Strategic And Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sudrajat, R. E., Susanti, & Uzliawati, L. (2023). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Dynamic Management Journal*, 7(2), 269–280. <http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v7i2>
- Suminar, R., & Purnama, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 50–63.
- Suri, M. (2025). Jurnal Manajemen, Akuntansi dan PendidikanDinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 2(1), 69–81. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v2i1.346>
- Surono, & Mayangsari, S. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan

- Keluarga Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 1–26. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.10357>
- Sutawan, M. D., & Sisdyani, E. A. (2022). Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan Sustainability Reporting. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2047–2057. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i08.p07>
- Tampubolon, H. J. (2019). Analisis Pengungkapan Stakeholder Engagement pada Situs Web Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Propinsi dan Kota di Indonesia). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(2), 14.
- Thimm, H., & Rasmussen, K. B. (2021). Website disclosure of environmental compliance management — the case of European production companies. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 648–670.
- Thu, H. N. T., Thu, T. B. T., Van, T. M., & Anh, T. D. (2025). The determinants influencing the extent and quality of corporate social responsibility disclosure. *Investment Management and Financial Innovations*, 22(2), 86–99. [https://doi.org/10.21511/imfi.22\(2\).2025.08](https://doi.org/10.21511/imfi.22(2).2025.08)
- Tubay, J. B., & Leon, M. V. De. (2020). Website Sustainability Disclosure Analysis : A Case of Publicly-Listed Mining Companies in the Philippines. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(1), 23–30.
- Wakhid, A. A. (2013). Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. *Jurnal TAPIs*, 9(2), 102–116.
- Wardah, A. M., & Nugrahaningsih, P. (2020). Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 134–156. <https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/111>
- Zulfikar, R., Fatmayati, F. P. S. A., Wandini, K., Haryati, T., Jumini, S., Nurjanah, Annisa, S., Kusumawardhani, O. B., Linggi, R. M. A. I., & Fadilah, H. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Teori, Metode dan Praktik* (E. Damayanti (ed.); 1st ed.). Penerbit Widina Media Utama.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Indeks Pengukuran TJSL

| <i>Perspective</i>        | <i>Element</i>                                              | <i>Code</i> | <i>Measurement</i>                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Environment</i></b> | Pernyataan umum/kebijakan lingkungan                        | E1          | Situs internet memuat pernyataan resmi tentang efisiensi energi, pengelolaan limbah, atau keanekaragaman hayati.            |
|                           | Isu lingkungan dalam visi, misi, tujuan, atau simbol daerah | E2          | Visi/misi daerah mencantumkan istilah seperti “berkelanjutan”, “go green”, atau simbol lingkungan.                          |
|                           | Strategi lingkungan                                         | E3          | Situs internet menjelaskan strategi/program seperti penghijauan, daur ulang, penghematan energi.                            |
|                           | Kegiatan/program lingkungan                                 | E4          | Situs internet menampilkan kegiatan/program lingkungan (contoh: reboisasi, pengelolaan sampah terpadu, penghematan energi). |
|                           | Publikasi isu lingkungan                                    | E5          | Ada berita, artikel, atau publikasi kegiatan lingkungan di website (situs internet).                                        |
|                           | Pelibatan stakeholder dalam isu lingkungan                  | E6          | Ada forum diskusi, konsultasi publik, atau interaksi media sosial resmi.                                                    |
|                           | Penghargaan di bidang lingkungan                            | E7          | Situs internet memuat informasi penghargaan (contoh: Adipura).                                                              |
|                           | Informasi unit/instansi lingkungan                          | E8          | Situs internet menyebutkan Dinas Lingkungan Hidup atau unit terkait.                                                        |
|                           | Kontak pengaduan lingkungan                                 | E9          | Situs internet mencantumkan kontak resmi untuk isu lingkungan.                                                              |

| <i>Perspective</i> | <i>Element</i>                                          | <i>Code</i> | <i>Measurement</i>                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Social</i>      | Pernyataan umum/kebijakan sosial                        | S1          | Situs internet memuat pernyataan resmi tentang keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan sosial.                                                                    |
|                    | Isu sosial dalam visi, misi, tujuan, atau simbol daerah | S2          | Visi/misi daerah mencantumkan istilah seperti “berkeadilan sosial”, “sejahtera”, “kesehatan masyarakat”.                                                                              |
|                    | Strategi sosial                                         | S3          | Situs internet menjelaskan strategi/program seperti pelatihan keselamatan, program kesehatan, atau pendidikan masyarakat.                                                             |
|                    | Kemitraan sosial dengan perusahaan                      | S4          | Situs internet memuat informasi kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan (BUMN/BUMD/swasta) dalam kegiatan seperti bantuan kesehatan, pendidikan masyarakat dan bantuan sosial. |
|                    | Komite/tim sosial                                       | S5          | Menunjukkan adanya lembaga/keompok khusus yang menangani isu sosial.                                                                                                                  |
|                    | Publikasi isu sosial                                    | S6          | Situs internet menampilkan berita/artikel tentang kegiatan sosial daerah.                                                                                                             |
|                    | Pelibatan stakeholder dalam isu sosial                  | S7          | Situs internet menampilkan forum diskusi, konsultasi publik, atau interaksi media sosial terkait isu sosial.                                                                          |
|                    | Kesempatan kerja lokal                                  | S8          | Situs internet menampilkan lowongan kerja, pelatihan kerja, atau program peningkatan keterampilan.                                                                                    |
|                    | Penghargaan di bidang sosial                            | S9          | Situs internet memuat penghargaan terkait pelayanan sosial atau kesejahteraan.                                                                                                        |

| <i>Perspective</i>                               | <i>Element</i>                                            | <i>Code</i> | <i>Measurement</i>                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Informasi unit/instansi sosial                            | S10         | Situs internet menyebutkan Dinas Sosial atau instansi terkait.                                                                                                                                      |
|                                                  | Kontak pengaduan sosial                                   | S11         | Situs internet mencantumkan kontak resmi layanan sosial (telepon/email).                                                                                                                            |
| <b>Transparency<br/>Assesement<br/>Indicator</b> | Menyajikan Rencana Kegiatan                               | TA 1        | 1. Transparansi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)<br>2. Transparansi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)                                                                 |
|                                                  | Memiliki situs web resmi yang dapat diakses secara publik | TA 2        | 1. Kemudahan mengakses laporan keuangan kab/kota<br>2. Kemudahan membuka konten apa pun di situs web resmi pemerintah kab/kota, artinya ketika dibuka langsung menuju bagian yang diinginkan        |
|                                                  | Memiliki situs web yang sering diperbarui                 | TA 3        | 1. Menyajikan berita terkini, setidaknya berita dari tiga tahun terakhir<br>2. Ketepatan waktu dalam mengunggah konten berita, yang berarti berita pada tahun tersebut juga diunggah pada tahun itu |
|                                                  | Pengungkapan Dokumen                                      | TA 4        | Transparansi informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, jelas dan lengkap                                                                                                                     |

*Sumber : (Joseph, 2010; M. Puspitasari et al., 2023; Tubay & Leon, 2020)*

**Lampiran 2. Kabupaten/Kota di Indonesia**

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>     | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>                   |
|------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1          | Kabupaten Aceh Barat      | 258        | Kota Malang                             |
| 2          | Kabupaten Aceh Barat Daya | 259        | Kota Mojokerto                          |
| 3          | Kabupaten Aceh Besar      | 260        | Kota Pasuruan                           |
| 4          | Kabupaten Aceh Jaya       | 261        | Kota Probolinggo                        |
| 5          | Kabupaten Aceh Selatan    | 262        | Kota Surabaya                           |
| 6          | Kabupaten Aceh Singkil    | 263        | Kota Administrasi Jakarta Barat         |
| 7          | Kabupaten Aceh Tamiang    | 264        | Kota Administrasi Jakarta Pusat         |
| 8          | Kabupaten Aceh Tengah     | 265        | Kota Administrasi Jakarta Selatan       |
| 9          | Kabupaten Aceh Tenggara   | 266        | Kota Administrasi Jakarta Timur         |
| 10         | Kabupaten Aceh Timur      | 267        | Kota Administrasi Jakarta Utara         |
| 11         | Kabupaten Aceh Utara      | 268        | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
| 12         | Kabupaten Bener Meriah    | 269        | Kabupaten Bantul                        |
| 13         | Kabupaten Bireuen         | 270        | Kabupaten Gunungkidul                   |
| 14         | Kabupaten Gayo Lues       | 271        | Kabupaten Kulon Progo                   |
| 15         | Kabupaten Nagan Raya      | 272        | Kabupaten Sleman                        |
| 16         | Kabupaten Pidie           | 273        | Kota Yogyakarta                         |
| 17         | Kabupaten Pidie Jaya      | 274        | Kabupaten Badung                        |
| 18         | Kabupaten Simeulue        | 275        | Kabupaten Bangli                        |
| 19         | Kota Banda Aceh           | 276        | Kabupaten Buleleng                      |
| 20         | Kota Langsa               | 277        | Kabupaten Gianyar                       |
| 21         | Kota Lhokseumawe          | 278        | Kabupaten Jembrana                      |
| 22         | Kota Sabang               | 279        | Kabupaten Karangasem                    |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>         | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>     |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 23         | Kota Subulussalam             | 280        | Kabupaten Klungkung       |
| 24         | Kabupaten Asahan              | 281        | Kabupaten Tabanan         |
| 25         | Kabupaten Batubara            | 282        | Kota Denpasar             |
| 26         | Kabupaten Dairi               | 283        | Kabupaten Bima            |
| 27         | Kabupaten Deli Serdang        | 284        | Kabupaten Dompu           |
| 28         | Kabupaten Humbang Hasundutan  | 285        | Kabupaten Lombok Barat    |
| 29         | Kabupaten Karo                | 286        | Kabupaten Lombok Tengah   |
| 30         | Kabupaten Labuhanbatu         | 287        | Kabupaten Lombok Timur    |
| 31         | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 288        | Kabupaten Lombok Utara    |
| 32         | Kabupaten Labuhanbatu Utara   | 289        | Kabupaten Sumbawa         |
| 33         | Kabupaten Langkat             | 290        | Kabupaten Sumbawa Barat   |
| 34         | Kabupaten Mandailing Natal    | 291        | Kota Bima                 |
| 35         | Kabupaten Nias                | 292        | Kota Mataram              |
| 36         | Kabupaten Nias Barat          | 293        | Kabupaten Alor            |
| 37         | Kabupaten Nias Selatan        | 294        | Kabupaten Belu            |
| 38         | Kabupaten Nias Utara          | 295        | Kabupaten Ende            |
| 39         | Kabupaten Padang Lawas        | 296        | Kabupaten Flores Timur    |
| 40         | Kabupaten Padang Lawas Utara  | 297        | Kabupaten Kupang          |
| 41         | Kabupaten Pakpak Bharat       | 298        | Kabupaten Lembata         |
| 42         | Kabupaten Samosir             | 299        | Kabupaten Malaka          |
| 43         | Kabupaten Serdang Bedagai     | 300        | Kabupaten Manggarai       |
| 44         | Kabupaten Simalungun          | 301        | Kabupaten Manggarai Barat |
| 45         | Kabupaten Tapanuli Selatan    | 302        | Kabupaten Manggarai Timur |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>        | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>          |
|------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| 46         | Kabupaten Tapanuli Tengah    | 303        | Kabupaten Ngada                |
| 47         | Kabupaten Tapanuli Utara     | 304        | Kabupaten Nagekeo              |
| 48         | Kabupaten Toba Samosir       | 305        | Kabupaten Rote Ndao            |
| 49         | Kota Binjai                  | 306        | Kabupaten Sabu Raijua          |
| 50         | Kota Gunungsitoli            | 307        | Kabupaten Sikka                |
| 51         | Kota Medan                   | 308        | Kabupaten Sumba Barat          |
| 52         | Kota Padangsidempuan         | 309        | Kabupaten Sumba Barat Daya     |
| 53         | Kota Pematangsiantar         | 310        | Kabupaten Sumba Tengah         |
| 54         | Kota Sibolga                 | 311        | Kabupaten Sumba Timur          |
| 55         | Kota Tanjungbalai            | 312        | Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| 56         | Kota Tebing Tinggi           | 313        | Kabupaten Timor Tengah Utara   |
| 57         | Kabupaten Agam               | 314        | Kota Kupang                    |
| 58         | Kabupaten Dharmasraya        | 315        | Kabupaten Bengkayang           |
| 59         | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 316        | Kabupaten Kapuas Hulu          |
| 60         | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 317        | Kabupaten Kayong Utara         |
| 61         | Kabupaten Padang Pariaman    | 318        | Kabupaten Ketapang             |
| 62         | Kabupaten Pasaman            | 319        | Kabupaten Kubu Raya            |
| 63         | Kabupaten Pasaman Barat      | 320        | Kabupaten Landak               |
| 64         | Kabupaten Pesisir Selatan    | 321        | Kabupaten Melawi               |
| 65         | Kabupaten Sijunjung          | 322        | Kabupaten Mempawah             |
| 66         | Kabupaten Solok              | 323        | Kabupaten Sambas               |
| 67         | Kabupaten Solok Selatan      | 324        | Kabupaten Sanggau              |
| 68         | Kabupaten Tanah Datar        | 325        | Kabupaten Sekadau              |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>                | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>         |
|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 69         | Kota Bukittinggi                     | 326        | Kabupaten Sintang             |
| 70         | Kota Padang                          | 327        | Kota Pontianak                |
| 71         | Kota Padangpanjang                   | 328        | Kota Singkawang               |
| 72         | Kota Pariaman                        | 329        | Kabupaten Balangan            |
| 73         | Kota Payakumbuh                      | 330        | Kabupaten Banjar              |
| 74         | Kota Sawahlunto                      | 331        | Kabupaten Barito Kuala        |
| 75         | Kota Solok                           | 332        | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 76         | Kabupaten Banyuasin                  | 333        | Kabupaten Hulu Sungai Tengah  |
| 77         | Kabupaten Empat Lawang               | 334        | Kabupaten Hulu Sungai Utara   |
| 78         | Kabupaten Lahat                      | 335        | Kabupaten Kotabaru            |
| 79         | Kabupaten Muara Enim                 | 336        | Kabupaten Tabalong            |
| 80         | Kabupaten Musi Banyuasin             | 337        | Kabupaten Tanah Bumbu         |
| 81         | Kabupaten Musi Rawas                 | 338        | Kabupaten Tanah Laut          |
| 82         | Kabupaten Musi Rawas Utara           | 339        | Kabupaten Tapin               |
| 83         | Kabupaten Ogan Ilir                  | 340        | Kota Banjarbaru               |
| 84         | Kabupaten Ogan Komering Ilir         | 341        | Kota Banjarmasin              |
| 85         | Kabupaten Ogan Komering Ulu          | 342        | Kabupaten Barito Selatan      |
| 86         | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  | 343        | Kabupaten Barito Timur        |
| 87         | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur    | 344        | Kabupaten Barito Utara        |
| 88         | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 345        | Kabupaten Gunung Mas          |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>       | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>         |
|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| 89         | Kota Lubuklinggau           | 346        | Kabupaten Kapuas              |
| 90         | Kota Pagar Alam             | 347        | Kabupaten Katingan            |
| 91         | Kota Palembang              | 348        | Kabupaten Kotawaringin Barat  |
| 92         | Kota Prabumulih             | 349        | Kabupaten Kotawaringin Timur  |
| 93         | Kabupaten Bengkalis         | 350        | Kabupaten Lamandau            |
| 94         | Kabupaten Indragiri Hilir   | 351        | Kabupaten Murung Raya         |
| 95         | Kabupaten Indragiri Hulu    | 352        | Kabupaten Pulang Pisau        |
| 96         | Kabupaten Kampar            | 353        | Kabupaten Sukamara            |
| 97         | Kabupaten Kepulauan Meranti | 354        | Kabupaten Seruyan             |
| 98         | Kabupaten Kuantan Singingi  | 355        | Kota Palangka Raya            |
| 99         | Kabupaten Pelalawan         | 356        | Kabupaten Berau               |
| 100        | Kabupaten Rokan Hilir       | 357        | Kabupaten Kutai Barat         |
| 101        | Kabupaten Rokan Hulu        | 358        | Kabupaten Kutai Kartanegara   |
| 102        | Kabupaten Siak              | 359        | Kabupaten Kutai Timur         |
| 103        | Kota Dumai                  | 360        | Kabupaten Mahakam Ulu         |
| 104        | Kota Pekanbaru              | 361        | Kabupaten Paser               |
| 105        | Kabupaten Bintan            | 362        | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| 106        | Kabupaten Karimun           | 363        | Kota Balikpapan               |
| 107        | Kabupaten Kepulauan Anambas | 364        | Kota Bontang                  |
| 108        | Kabupaten Lingga            | 365        | Kota Samarinda                |
| 109        | Kabupaten Natuna            | 366        | Kabupaten Bulungan            |
| 110        | Kota Batam                  | 367        | Kabupaten Malinau             |
| 111        | Kota Tanjung Pinang         | 368        | Kabupaten Nunukan             |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>          | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>              |
|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|
| 112        | Kabupaten Batanghari           | 369        | Kabupaten Tana Tidung              |
| 113        | Kabupaten Bungo                | 370        | Kota Tarakan                       |
| 114        | Kabupaten Kerinci              | 371        | Kabupaten Boalemo                  |
| 115        | Kabupaten Merangin             | 372        | Kabupaten Bone Bolango             |
| 116        | Kabupaten Muaro Jambi          | 373        | Kabupaten Gorontalo                |
| 117        | Kabupaten Sarolangun           | 374        | Kabupaten Gorontalo Utara          |
| 118        | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 375        | Kabupaten Pohuwato                 |
| 119        | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 376        | Kota Gorontalo                     |
| 120        | Kabupaten Tebo                 | 377        | Kabupaten Bantaeng                 |
| 121        | Kota Jambi                     | 378        | Kabupaten Barru                    |
| 122        | Kota Sungai Penuh              | 379        | Kabupaten Bone                     |
| 123        | Kabupaten Bengkulu Selatan     | 380        | Kabupaten Bulukumba                |
| 124        | Kabupaten Bengkulu Tengah      | 381        | Kabupaten Enrekang                 |
| 125        | Kabupaten Bengkulu Utara       | 382        | Kabupaten Gowa                     |
| 126        | Kabupaten Kaur                 | 383        | Kabupaten Jenepono                 |
| 127        | Kabupaten Kepahiang            | 384        | Kabupaten Kepulauan Selayar        |
| 128        | Kabupaten Lebong               | 385        | Kabupaten Luwu                     |
| 129        | Kabupaten Mukomuko             | 386        | Kabupaten Luwu Timur               |
| 130        | Kabupaten Rejang Lebong        | 387        | Kabupaten Luwu Utara               |
| 131        | Kabupaten Seluma               | 388        | Kabupaten Maros                    |
| 132        | Kota Bengkulu                  | 389        | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan |
| 133        | Kabupaten Bangka               | 390        | Kabupaten Pinrang                  |
| 134        | Kabupaten Bangka Barat         | 391        | Kabupaten Sidenreng Rappang        |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>         | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>      |
|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 135        | Kabupaten Bangka Selatan      | 392        | Kabupaten Sinjai           |
| 136        | Kabupaten Bangka Tengah       | 393        | Kabupaten Soppeng          |
| 137        | Kabupaten Belitung            | 394        | Kabupaten Takalar          |
| 138        | Kabupaten Belitung Timur      | 395        | Kabupaten Tana Toraja      |
| 139        | Kota Pangkal Pinang           | 396        | Kabupaten Toraja Utara     |
| 140        | Kabupaten Lampung Tengah      | 397        | Kabupaten Wajo             |
| 141        | Kabupaten Lampung Utara       | 398        | Kota Makassar              |
| 142        | Kabupaten Lampung Selatan     | 399        | Kota Palopo                |
| 143        | Kabupaten Lampung Barat       | 400        | Kota Parepare              |
| 144        | Kabupaten Lampung Timur       | 401        | Kabupaten Bombana          |
| 145        | Kabupaten Mesuji              | 402        | Kabupaten Buton            |
| 146        | Kabupaten Pesawaran           | 403        | Kabupaten Buton Selatan    |
| 147        | Kabupaten Pesisir Barat       | 404        | Kabupaten Buton Tengah     |
| 148        | Kabupaten Pringsewu           | 405        | Kabupaten Buton Utara      |
| 149        | Kabupaten Tulang Bawang       | 406        | Kabupaten Kolaka           |
| 150        | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 407        | Kabupaten Kolaka Timur     |
| 151        | Kabupaten Tanggamus           | 408        | Kabupaten Kolaka Utara     |
| 152        | Kabupaten Way Kanan           | 409        | Kabupaten Konawe           |
| 153        | Kota Bandar Lampung           | 410        | Kabupaten Konawe Kepulauan |
| 154        | Kota Metro                    | 411        | Kabupaten Konawe Selatan   |
| 155        | Kabupaten Lebak               | 412        | Kabupaten Konawe Utara     |
| 156        | Kabupaten Pandeglang          | 413        | Kabupaten Muna             |
| 157        | Kabupaten Serang              | 414        | Kabupaten Muna Barat       |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>   | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>                      |
|------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 158        | Kabupaten Tangerang     | 415        | Kabupaten Wakatobi                         |
| 159        | Kota Cilegon            | 416        | Kota Bau-Bau                               |
| 160        | Kota Serang             | 417        | Kota Kendari                               |
| 161        | Kota Tangerang          | 418        | Kabupaten Banggai                          |
| 162        | Kota Tangerang Selatan  | 419        | Kabupaten Banggai Kepulauan                |
| 163        | Kabupaten Bandung       | 420        | Kabupaten Banggai Laut                     |
| 164        | Kabupaten Bandung Barat | 421        | Kabupaten Buol                             |
| 165        | Kabupaten Bekasi        | 422        | Kabupaten Donggala                         |
| 166        | Kabupaten Bogor         | 423        | Kabupaten Morowali                         |
| 167        | Kabupaten Ciamis        | 424        | Kabupaten Morowali Utara                   |
| 168        | Kabupaten Cianjur       | 425        | Kabupaten Parigi Moutong                   |
| 169        | Kabupaten Cirebon       | 426        | Kabupaten Poso                             |
| 170        | Kabupaten Garut         | 427        | Kabupaten Sigi                             |
| 171        | Kabupaten Indramayu     | 428        | Kabupaten Tojo Una-Una                     |
| 172        | Kabupaten Karawang      | 429        | Kabupaten Toli-Toli                        |
| 173        | Kabupaten Kuningan      | 430        | Kota Palu                                  |
| 174        | Kabupaten Majalengka    | 431        | Kabupaten Bolaang Mongondow                |
| 175        | Kabupaten Pangandaran   | 432        | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan        |
| 176        | Kabupaten Purwakarta    | 433        | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur          |
| 177        | Kabupaten Subang        | 434        | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara          |
| 178        | Kabupaten Sukabumi      | 435        | Kabupaten Kepulauan Sangihe                |
| 179        | Kabupaten Sumedang      | 436        | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>           |
|------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| 180        | Kabupaten Tasikmalaya  | 437        | Kabupaten Kepulauan Talaud      |
| 181        | Kota Bandung           | 438        | Kabupaten Minahasa              |
| 182        | Kota Banjar            | 439        | Kabupaten Minahasa Selatan      |
| 183        | Kota Bekasi            | 440        | Kabupaten Minahasa Tenggara     |
| 184        | Kota Bogor             | 441        | Kabupaten Minahasa Utara        |
| 185        | Kota Cimahi            | 442        | Kota Bitung                     |
| 186        | Kota Cirebon           | 443        | Kota Kotamobagu                 |
| 187        | Kota Depok             | 444        | Kota Manado                     |
| 188        | Kota Sukabumi          | 445        | Kota Tomohon                    |
| 189        | Kota Tasikmalaya       | 446        | Kabupaten Majene                |
| 190        | Kabupaten Banjarnegara | 447        | Kabupaten Mamasa                |
| 191        | Kabupaten Banyumas     | 448        | Kabupaten Mamuju                |
| 192        | Kabupaten Batang       | 449        | Kabupaten Mamuju Tengah         |
| 193        | Kabupaten Blora        | 450        | Kabupaten Mamuju Utara          |
| 194        | Kabupaten Boyolali     | 451        | Kabupaten Polewali Mandar       |
| 195        | Kabupaten Brebes       | 452        | Kabupaten Buru                  |
| 196        | Kabupaten Cilacap      | 453        | Kabupaten Buru Selatan          |
| 197        | Kabupaten Demak        | 454        | Kabupaten Kepulauan Aru         |
| 198        | Kabupaten Grobogan     | 455        | Kabupaten Maluku Barat Daya     |
| 199        | Kabupaten Jepara       | 456        | Kabupaten Maluku Tengah         |
| 200        | Kabupaten Karanganyar  | 457        | Kabupaten Maluku Tenggara       |
| 201        | Kabupaten Kebumen      | 458        | Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| 202        | Kabupaten Kendal       | 459        | Kabupaten Seram Bagian Barat    |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>        |
|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 203        | Kabupaten Klaten      | 460        | Kabupaten Seram Bagian Timur |
| 204        | Kabupaten Kudus       | 461        | Kota Ambon                   |
| 205        | Kabupaten Magelang    | 462        | Kota Tual                    |
| 206        | Kabupaten Pati        | 463        | Kabupaten Halmahera Barat    |
| 207        | Kabupaten Pekalongan  | 464        | Kabupaten Halmahera Tengah   |
| 208        | Kabupaten Pemalang    | 465        | Kabupaten Halmahera Utara    |
| 209        | Kabupaten Purbalingga | 466        | Kabupaten Halmahera Selatan  |
| 210        | Kabupaten Purworejo   | 467        | Kabupaten Kepulauan Sula     |
| 211        | Kabupaten Rembang     | 468        | Kabupaten Halmahera Timur    |
| 212        | Kabupaten Semarang    | 469        | Kabupaten Pulau Morotai      |
| 213        | Kabupaten Sragen      | 470        | Kabupaten Pulau Taliabu      |
| 214        | Kabupaten Sukoharjo   | 471        | Kota Ternate                 |
| 215        | Kabupaten Tegal       | 472        | Kota Tidore Kepulauan        |
| 216        | Kabupaten Temanggung  | 473        | Kabupaten Asmat              |
| 217        | Kabupaten Wonogiri    | 474        | Kabupaten Biak Numfor        |
| 218        | Kabupaten Wonosobo    | 475        | Kabupaten Boven Digoel       |
| 219        | Kota Magelang         | 476        | Kabupaten Deiyai             |
| 220        | Kota Pekalongan       | 477        | Kabupaten Dogiyai            |
| 221        | Kota Salatiga         | 478        | Kabupaten Intan Jaya         |
| 222        | Kota Semarang         | 479        | Kabupaten Jayapura           |
| 223        | Kota Surakarta        | 480        | Kabupaten Jayawijaya         |
| 224        | Kota Tegal            | 481        | Kabupaten Keerom             |
| 225        | Kabupaten Bangkalan   | 482        | Kabupaten Kepulauan Yapen    |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>        |
|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 226        | Kabupaten Banyuwangi  | 483        | Kabupaten Lanny Jaya         |
| 227        | Kabupaten Blitar      | 484        | Kabupaten Mamberamo Raya     |
| 228        | Kabupaten Bojonegoro  | 485        | Kabupaten Mamberamo Tengah   |
| 229        | Kabupaten Bondowoso   | 486        | Kabupaten Mappi              |
| 230        | Kabupaten Gresik      | 487        | Kabupaten Merauke            |
| 231        | Kabupaten Jember      | 488        | Kabupaten Mimika             |
| 232        | Kabupaten Jombang     | 489        | Kabupaten Nabire             |
| 233        | Kabupaten Kediri      | 490        | Kabupaten Nduga              |
| 234        | Kabupaten Lamongan    | 491        | Kabupaten Paniai             |
| 235        | Kabupaten Lumajang    | 492        | Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 236        | Kabupaten Madiun      | 493        | Kabupaten Puncak             |
| 237        | Kabupaten Magetan     | 494        | Kabupaten Puncak Jaya        |
| 238        | Kabupaten Malang      | 495        | Kabupaten Sarmi              |
| 239        | Kabupaten Mojokerto   | 496        | Kabupaten Supiori            |
| 240        | Kabupaten Nganjuk     | 497        | Kabupaten Tolikara           |
| 241        | Kabupaten Ngawi       | 498        | Kabupaten Waropen            |
| 242        | Kabupaten Pacitan     | 499        | Kabupaten Yahukimo           |
| 243        | Kabupaten Pamekasan   | 500        | Kabupaten Yalimo             |
| 244        | Kabupaten Pasuruan    | 501        | Kota Jayapura                |
| 245        | Kabupaten Ponorogo    | 502        | Kabupaten Fakfak             |
| 246        | Kabupaten Probolinggo | 503        | Kabupaten Kaimana            |
| 247        | Kabupaten Sampang     | 504        | Kabupaten Manokwari          |
| 248        | Kabupaten Sidoarjo    | 505        | Kabupaten Manokwari Selatan  |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>      |
|------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| 249        | Kabupaten Situbondo   | 506        | Kabupaten Maybrat          |
| 250        | Kabupaten Sumenep     | 507        | Kabupaten Pegunungan Arfak |
| 251        | Kabupaten Trenggalek  | 508        | Kabupaten Raja Ampat       |
| 252        | Kabupaten Tuban       | 509        | Kabupaten Sorong           |
| 253        | Kabupaten Tulungagung | 510        | Kabupaten Sorong Selatan   |
| 254        | Kota Batu             | 511        | Kabupaten Tambrauw         |
| 255        | Kota Blitar           | 512        | Kabupaten Teluk Bintuni    |
| 256        | Kota Kediri           | 513        | Kabupaten Teluk Wondama    |
| 257        | Kota Madiun           | 514        | Kota Sorong                |

*Sumber : Badan Pusat Statistik*